Ika Kartika Sari
Elly Malihah Setiadi

Aku Warga Negara Indonesia

untuk SD/MI Kelas VI

Ika Kartika Sari
Elly Malihah Setiadi
Aku Warga Negara Indonesia untuk SD/MI Kelas VI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
&
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

6

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Ika Kartika Sari
Elly Malihah Setiadi

Aku Warga Negara Indonesia

untuk SD/MI Kelas VI

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Aku Warga Negara

Indonesia

Untuk Siswa SD/MI Kelas VI

Penulis
Ika Kartika Sari, Elly Malihah Setiadi

Tata Letak
Andhika Cakra Permana

Design Cover
Aditya Pratama

Jenis Huruf
Goudy 12 pt, Gillsans MT

Ukuran Buku
17,6 x 25 cm

372.8
IKA
a

IKA Kartika Sari
Aku Warga Negara Indonesia 6 : Untuk SD/MI Kelas VI / Penulis Ika Kartika Sari, Elly Malihah Setiadi. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vii, 105 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 105
Indeks
ISBN : 978-979-068-097-5

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Elly Malihah Setiadi

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
Diperbanyak oleh .....

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Adik-adik, kita adalah warga negara Indonesia. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewarganegaraan.

Buku yang tengah kamu baca ini adalah buku pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya diuraikan tentang cara-cara menjadi warga negara yang baik. Bacalah isinya dengan saksama, kerjakan latihan dan tugas-tugas yang ada pada bagian akhir bab.

Buku ini ditulis untuk menjadi pegangan bagi siswa kelas 6 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dalam belajar di kelas maupun di luar kelas.

Susunan buku ini terdiri atas bagian-bagian Pendahuluan, Uraian Materi Pelajaran, Kegiatan Siswa, Rangkuman, Soal-soal Latihan, dan Daftar Istilah Penting.

Buku ini sebaiknya dipelajari dengan cara-cara berikut.

1. Baca dulu bagian pendahuluan setiap bab, lalu rangkumannya.
2. Setelah membaca pendahuluan dan rangkuman, baca soal-soal latihannya, tetapi jangan dulu dijawab.
3. Bacalah uraian materi pelajarannya, lalu lanjutkan dengan menjawab soal-soal di bagian akhir bab.
4. Untuk lebih mendalami isi buku ini, kamu dapat mempelajari dan mengerjakan kegiatan siswa.
5. Apabila menemukan istilah-istilah yang sulit dipahami, kamu dapat mencarinya pada bagian akhir buku ini.

Apabila kamu mempelajarinya dengan baik, kamu akan menjadi warga negara Indonesia yang baik.Warga negara Indonesia yang baik adalah warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Warga negara yang baik juga bersikap demokratis, tidak suka memaksakan kehendak, dan selalu mengutamakan kewajiban daripada hak-haknya. Ia senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara.

Pribadi warga negara yang baik di antaranya adalah rajin dan tekun belajar, tidak mau ketinggalan jaman, dan selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ayo, kita bangun semangat kita untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara belajar lebih tekun lagi. Kamu bisa jika kamu mau.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya buku ini.

Januari 2008

Penulis,

Daftar Isi

Pendahuluan

Buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang kamu baca ini disusun dengan tujuan untuk menuntun para siswa dalam belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Buku ini juga bermanfaat untuk membantu para guru dalam kegiatan pembelajaran.

Keunggulan yang terdapat dalam buku ini ialah bahwa dalam proses penyajian senantiasa mengajak siswa untuk berpikir kritis dan evaluatif, sehingga kami ajukan beberapa pertanyaan sentuhan di tengah-tengah sajian dan di akhir sajian sebagai refleksi. Pendekatan kontekstual kami kemas sedemikian rupa sehingga siswa dapat lebih memahami materi pelajaran sesuai dengan alam pikir dan pengalaman mereka.

Untuk mempelajari buku ini secara efektif dan efisien, para siswa hendaknya mengikuti cara belajar berikut.

1. Bacalah terlebih dahulu peta konsep dan kata-kata kunci yang ada di dalam buku ini. Kemudian baca pula rangkumannya.
2. Selanjutnya, siswa membaca uraian bab dan sub bab yang terdapat di dalamnya. Apabila menemukan beberapa pertanyaan renungan yang mengajak berpikir kritis dan evaluatif, berhentilah sejenak dan renungkan dengan saksama.
3. Jangan lupa, ketika sedang membaca buku ini, siswa diharapkan menandai konsep-konsep penting yang terdapat di dalamnya, atau membuat catatan khusus di dalam buku catatan.
4. Apabila telah dibaca secara utuh, kerjakan soal-soal latihannya. Kerjakan soal-soal itu tanpa harus melihat kembali kepada uraian di dalam buku. Soal-soal yang belum mampu kamu jawab, tinggalkan jangan diisi terlebih dahulu. Bila telah selesai menjawab soal-soal latihan bab, baca kembali uraian materi yang belum dipahami untuk menemukan jawaban atas soal-soal yang belum terjawab tadi.
5. Kegiatan siswa dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan di luar jam sekolah.
6. Pada akhir semester kami sajikan latihan ulangan semester. Latihan ini sebaiknya dikerjakan untuk mengecek penguasaan kamu terhadap materi ajar yang telah kamu pelajari selama satu semester.
7. Apabila ada kata-kata yang sulit dipahami, bukalah glosarium (daftar istilah) sehingga kamu tidak terganggu dalam memahami konsep yang disajikan.
8. Jika kamu masih belum memahami suatu konsep yang disajikan dalam buku ini, tanyakan kepada gurumu. Catat pertanyaan itu dalam buku tulismu, dan ajukan pertanyaan kepada guru di sekolah atau kepada orang tuamu di rumah.
9. Apabila kamu ingin mendalami lebih lanjut pelajaran yang kamu pelajari, kamu dapat mencari buku sumber aslinya yang terdapat dalam daftar pustaka.
10. Apabila kamu telah memahami materi ajar yang disajikan di dalamnya, kamu dapat memilih bagian yang belum kamu pahami. Gunakan daftar isi untuk mencarinya.

Siswa sedang mengerjakan latihan yang ada di dalam buku
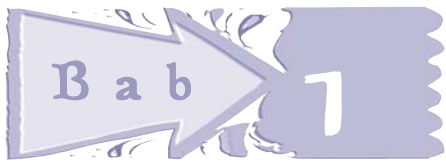
Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara lahir melalui perjalanan yang cukup panjang. Penghayatan akan masa lalu bangsa dan perjalanan hidup bangsa selama beratus-ratus tahun dalam penjajahan turut mewarnai proses perumusan tersebut. Pahit getirnya hidup di bawah telapak kaki penjajah turut mempengaruhi semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.

Banyak nilai juang yang dapat diteladani dari para pejuang bangsa dalam proses merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, di antaranya nilai kebersamaan, kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok, serta nilai-nilai lainnya.

Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pejuang bangsa itu dinamakan nilai-nilai juang. Disebut nilai-nilai juang karena nilai-nilai ini penting dalam proses perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Sebagai generasi muda bangsa, kita hendaknya senantiasa meneladani beberapa sikap yang dicontohkan para pejuang bangsa dalam merumuskan dasar negara. Caranya ialah dengan selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita berarti kita telah meneladani dan sekaligus meneruskan nilai-nilai yang telah diwariskan para pejuang bangsa di masa lalu.

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan arti dan makna nilai juang;
2. mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara;
3. menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara;
4. meneladani nilai-nilai juang yang dicontohkan para pejuang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Yang Dipelajari dalam Bab Ini (Peta Konsep)
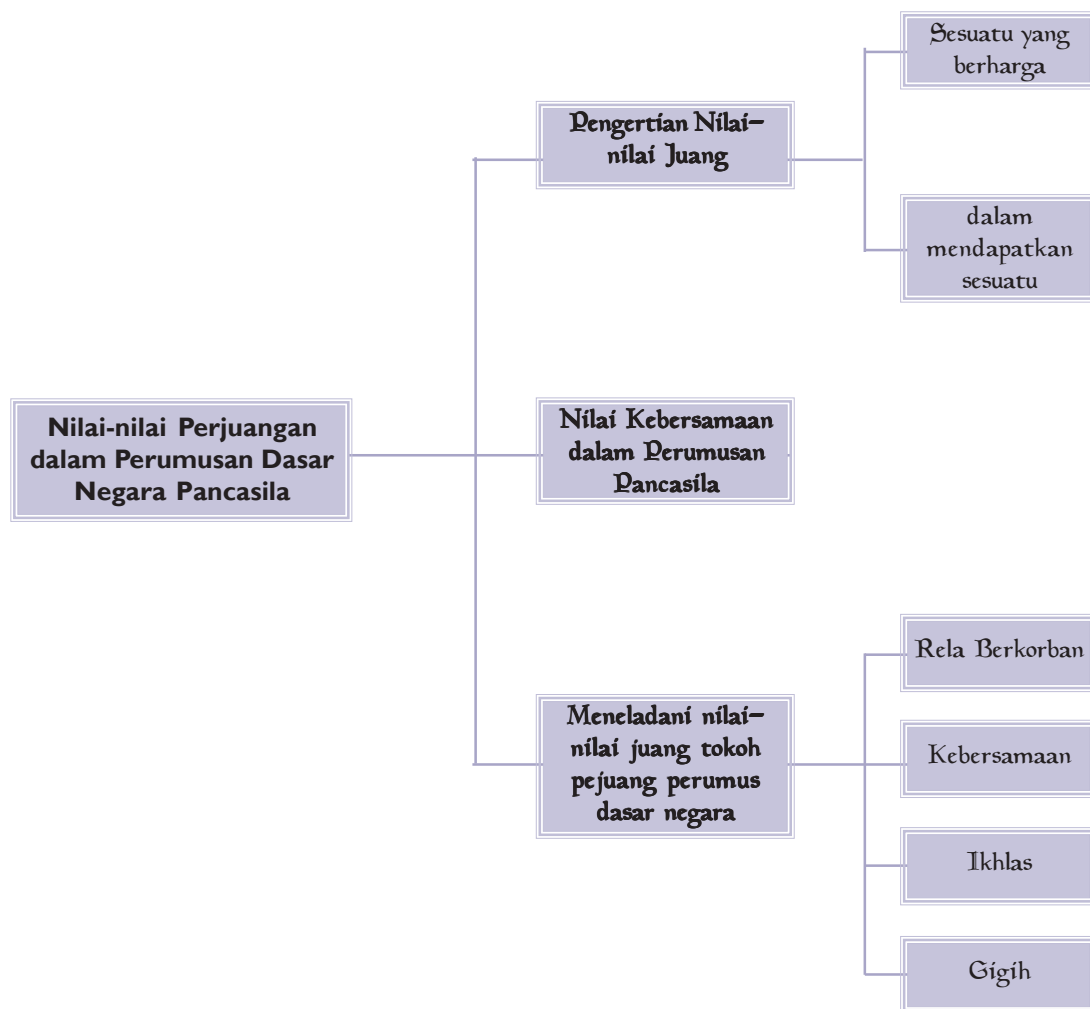
Kata-kata Kunci:

- ☐ nilai juang
- ☐ kebersamaan
- ☐ tulus ikhlas
- ☐ pantang menyerah
- ☐ dasar negara
- ☐ Pancasila
- ☐ rela berkorban
- ☐ gigih
- ☐ lapang dada

A Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Dalam usaha mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai juang yang selalu mewarnai perjuangan mereka. Nilai-nilai itu memberi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita hidup.

Apakah nilai juang itu? Nilai-nilai juang apa saja yang mewarnai bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan? Nilai-nilai juang apa saja yang memengaruhi bangsa Indonesia dalam proses perumusan dasar negara, Pancasila? Marilah kita pelajari dengan saksama.

1. Pengertian dan Makna Nilai Juang

Apa yang kamu ketahui tentang nilai juang?

Perhatikan kutipan kalimat di bawah ini dengan saksama!

a. Sebagai generasi muda, kita harus mewarisi nilai-nilai juang yang dilakukan para pendiri negara kita.
b. Nilai-nilai perjuangan yang mewarnai bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan di antaranya ialah berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
c. Nilai-nilai pergaulan yang dianut bangsa kita berbeda dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Amerika.

Dari ketiga kutipan kalimat di atas, kita dapat menarik pengertian atau makna nilai. **Nilai** yaitu sesuatu yang berharga atau berguna. **Juang** artinya usaha untuk mendapatkan sesuatu atau usaha untuk menggapai cita-cita. Jadi, nilai juang artinya sesuatu yang berharga dalam usaha mendapatkan (merebut) sesuatu atau dalam mencapai cita-cita. Berkaitan dengan ketiga kalimat di atas, maka kita dapat mengartikan kalimat di atas seperti berikut:

a. Sebagai generasi muda, kita harus mewarisi sesuatu yang berharga dalam perjuangan yang dilakukan para pendiri negara kita.
b. Sesuatu yang berharga dalam perjuangan itu di antaranya ialah berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
c. Sesuatu yang berharga yang dianut bangsa kita berbeda dengan sesuatu yang berharga yang dianut bangsa Amerika.

Jadi, nilai juang artinya sesuatu yang berharga dalam usaha mendapatkan (merebut) sesuatu atau dalam mencapai cita-cita.

2. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Bagaimana proses perumusan dasar negara, Pancasila?

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui tahapan–tahapan berikut, yakni:

a. Sidang I BPUPKI Tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945

Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha–usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini dibicarakan mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka atau *Philosofische Grondslag* Indonesia Merdeka.

Usul mengenai asas dan dasar Indonesia merdeka pertama–tama dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 dengan judul "*Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia*". Mr. Muhammad Yamin mengusulkan lima asas dan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yakni:

(1) Peri Kebangsaan;
(2) Peri Kemanusiaan;
(3) Peri Ketuhanan;
(4) Peri Kerakyatan;
(5) Kesejahteraan Sosial.

Kendatipun demikian pendapat Yamin dalam pidatonya, tetapi setelah selesai pidato ia memberikan konsep mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka yang agak berbeda dengan apa yang dipidatokan. Asas dan dasar negara Indonesia merdeka menurut Mohammad Yamin dalam konsep tertulis yang diberikan kepada Ketua ialah:

(1) Ketuhanan Yang Mahaesa;
(2) Persatuan Kebangsaan Indonesia;
(3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;
(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain Yamin, Mr. Soepomo juga mengemukakan gagasan mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Gagasan Soepomo mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka ialah:

(1) Persatuan;
(2) Kekeluargaan;
(3) Keseimbangan lahir dan batin;
(4) Musyawarah;
(5) Keadilan rakyat.

Sedangkan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengemukakan asas dan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut:

(1) Kebangsaan Indonesia;
(2) Internasionalisme atau perikemanusiaan;
(3) Mufakat atau demokrasi;
(4) Kesejahteraan sosial;
(5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Ir. Sukarno menyarankan lima asas untuk berdirinya bangunan negara itu hendaknya diberi nama Pancasila, artinya lima dasar. Gagasan ini ia kemukakan atas saran dari salah seorang temannya, ahli bahasa. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan nama temannya itu.

b. Sidang Panitia Kecil 22 Juni 1945

Dalam sidang pertama BPUPKI disepakati bahwa untuk menindaklanjuti sidang yang belum mencapai kesimpulan dibentuk Panitia Kecil. Panitia Kecil ini bertugas merumuskan hasil sidang I dengan lebih jelas. Anggota Panitia Kecil ada sembilan orang sehingga sering disebut Panitia Sembilan. Kesembilan tokoh tersebut ialah:

- Ir. Soekarno (Ketua merangkap anggota);
- Drs. Mu. hatta (Wakil Ketua merangkap anggota);
- A.A. Maramis, S.h. (anggota);
- Abikusno Cokrosuyoso (anggota);
- Abdul Kahar Muzakkir (anggota);
- haji Agus Salim (angota);
- K.h. Wahid hasyim (anggota);
- Achmad Soebardjo, S.h. (anggota);
- Mr. Muh. Yamin (anggota).

Sidang Panitia Sembilan ini dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945 di Gedung Jawa hokokai Jakarta. Selain panitia sembilan, anggota BPUPKI lainnya juga hadir dalam rapat tersebut, sehingga jumlah peserta rapat ada 38 orang.

Dalam sidang Panitia Kecil tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan piagam Jakarta.

Isi Piagam Jakarta selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghan-tarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Apa perbedaan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945?

c. Sidang II BPUPKI

Sidang II BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Dalam sidang ini dibicarakan mengenai penyusunan Rencana Pembukaan Undang-undang Dasar dan rencana Undang-undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945 dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan sebagai berikut:

- Ir. Sukarno;
- R. Otto Iskandardinata;
- B.P.H. Purbaya;
- K.H. Agus Salim;
- Mr. Achmad Subarjo;
- Mr. R. Supomo;

- Mr. Maria Ulfah Santosa;
- K.H. Wahid Hasyim;
- Parada Harahap;
- Mr. J. Latuharhary;
- Mr. R. Susanto Tirtoprojo;
- Mr. Sartono;
- Mr. KPRT Wongso Negoro;
- KRTH Wuryaningrat;
- Mr. R.P. Singgih;
- Mr. Tan Eng Hoa;
- dr. P.A. Husein Jayadiningrat;
- dr. Sukirman Wiryosanjoyo;
- Mr. A.A. Maramis;
- Miyano (utusan Jepang).

Atas usul dari Husein Jayadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia Perancang Undang-undang Dasar dibentuk Panitia Kecil dengan susunan sebagai berikut:

- Panitia Kecil *Declaration of Rights*, dengan susunan anggota Mr. Achmad Subardjo (Ketua), Parada Harahap, dan dr. Sukirman Wiryosanjoyo.
- Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar dengan susunan Mr. Soepomo (Ketua), Mr. Achmad Soebardjo, K.P.R.T. Wongsonegoro, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, K.H. Agus Salim, dr. Sukirman Wiryosanjoyo.
- Untuk Preambul (Pembukaan) tidak dibentuk panitia kecil karena hasil Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 telah diterima.

Dalam rapat yang memakan waktu selama 7 hari itu, dihasilkan Rancangan Undang-undang Dasar untuk Indonesia Merdeka.

Dapatkah kamu menangkap kekompakan mereka dalam menyusun UUD 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila? Nilai apa yang mereka miliki?

Usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI hanya sampai di sini, karena selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketua PPKI ialah Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Muh. Hatta.

d. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara melalui PPKI?

Meskipun badan ini buatan Jepang, akan tetapi sampai menyerahnya Jepang kepada Sekutu (14 Agustus 1945), badan ini tidak pernah dilantik oleh Jepang. Keanggotaan PPKI pun adalah bangsa Indonesia sendiri. Sejak perumusan teks Proklamasi sebagian anggota PPKI ini telah mulai memerankan fungsinya sebagai wakil-wakil rakyat Indonesia.

Sesuai dengan rencana semula, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau *Dokoritsu Zunbi Iinkai* akan mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni akan membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, karena pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka lepas dari campur tangan Jepang, maka akhirnya sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dimanfaatkan untuk melengkapi persyaratan berdirinya negara yang belum terpenuhi.

Secara garis besarnya, kegiatan rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dibagi ke dalam dua tahap, yaitu:

1) *Tahap Sebelum Rapat PPKI*

Pada tahap ini diadakan rapat kecil yang terdiri atas Drs. Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Teuku Moh. Hasan. Mereka mengadakan rapat pendahuluan dan menghasilkan kesepakatan mengubah kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Mahaesa". Dengan perubahan tersebut, maka seluruh hukum Undang-undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam, misalnya daerah-daerah yang diduduki Kaigun.

Menurut Drs. Muh. Hatta, adanya perubahan itu menandakan bahwa para pemimpin bangsa pada waktu itu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Perhatikanlah bagaimana para pemimpin bangsa kita begitu toleran terhadap sesamanya, sehingga semua paham dan golongan yang berbeda dapat dipersatukan dengan kearifan mereka.

2) *Rapat Utama PPKI*

Rapat ini dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Muh. Hatta. Dalam rapat ini diputuskan tiga keputusan penting, yakni:

- Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 setelah mengalami perubahan di sana-sini. Dalam UUD tercantum dasar negara. Dengan demikian PPKI pun telah menetapkan dasar negara RI yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya;

- Memilih dan mengangkat Ir. Sukarno dan Drs. Muh. hatta, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat nilai-nilai juang yang digunakan para pejuang bangsa kita. Di antara nilai-nilai juang tersebut adalah:

1. Nilai persatuan dan kesatuan mereka begitu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Nilai keikhlasan

   Para perumus dasar negara kita saat itu tidak terpikir untuk mendapat imbalan. Mereka ikhlas demi bangsa dan negaranya.
3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan

   Demi keadilan, mereka berani melakukan perjuangan di tengah-tengah bahaya.
4. Toleran terhadap perbedaan

   Perumusan dasar negara diwarnai dengan sikap menghargai perbedaan.
5. Nilai musyawarah mufakat

   Mereka merumuskan dasar negara dengan asas musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Bagaimana sikap bangsa Indonesia sekarang? Masihkah mereka menjungjung tinggi nilai-nilai tersebut?

B Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Dasar Negara

Bagaimana nilai-nilai kebersamaan mewarnai proses perumusan dasar negara Pancasila?

Saat bangsa Indonesia merumuskan dasar negara, kita dapat menangkap kentalnya nilai-nilai kebersamaan di antara mereka. Perhatikan bagaimana sebagian tokoh pejuang kita begitu rela mengubah kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Apabila tokoh pejuang kita tidak memiliki sikap kebersamaan, tentu saja kalimat itu tidak akan diubah, dan jika tidak diubah sudah barang tentu bangsa kita terpecah-belah saat itu. Mereka yang tidak beragama Islam tidak dapat diwadahi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untunglah para tokoh pejuang bangsa kita saat itu memahami nilai-nilai kebersamaan, sehingga semua paham dan golongan dapat dipersatukan.

Apa yang terjadi jika saat perumusan dasar negara para pejuang bangsa kita tidak memiliki sikap kebersamaan?

Demikian pula saat sidang Panitia Sembilan. Apabila kita cermati dengan saksama, pendapat yang banyak masuk dalam Piagam Jakarta mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka adalah pendapat Muh. Yamin. Akan tetapi, Ir. Sukarno, Mr. Supomo, dan tokoh lainnya tidak memaksakan kehendaknya. Mereka begitu lapang dada memerima hasil keputusan bersama itu. Inilah hakikat sikap kebersamaan.

Nilai-nilai apa yang menonjol saat itu? Itulah yang disebut nilai kebersamaan atau nilai persatuan dan kesatuan. Mereka lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok (golongan).

Apakah nilai-nilai kebersamaan masih dimiliki bangsa Indonesia saat ini? Apa buktinya?

C Meneladani Nilai-nilai Juang Para Pendiri Negara dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai-nilai juang yang dapat kita teladani dari para pendiri negara kita cukuplah banyak. Di antara nilai-nilai juang tersebut dapat kamu baca seperti dalam uraian berikut.

1. Sikap Rela Berkorban

a. Pengertian Rela Berkorban

Sebagai makhluk sosial manusia tentu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Seorang anak tidak akan bisa hidup dan tumbuh menjadi besar dan dewasa tanpa pertolongan orang tua. Pertolongan orang tua pada anaknya, dari mulai ia dikandung sampai menjadi dewasa disebut pengorbanan orang tua.

Sikap kerelaan berkorban orang tua sangat berarti bagi seorang anak. Dengan sikap ini seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa.

Apakah sikap rela berkorban itu?

Apabila kamu mengamati apa yang dilakukan orang tuamu untuk anak-anaknya, kamu dapat menemukan sikap rela berkorban. Orang tuamu mau memberikan apa yang dipunyai untuk anak-anaknya. Mereka juga rela melakukan apa saja demi anak-anak mereka. Mereka tidak meng-harapkan imbalan atau balas budi dari anak. Itulah yang dimaksud dengan sikap rela berkorban.

Bila kita simpulkan, rela berkorban adalah sikap rela hati mengorbankan apa yang dimiliki untuk kebahagiaan orang lain. Misalnya, orang tua memiliki tenaga, pikiran, waktu, uang, dan segala yang dimiliki. Ia rela mengorbankan miliknya itu demi kebahagiaan anaknya. Inilah sikap rela berkorban.
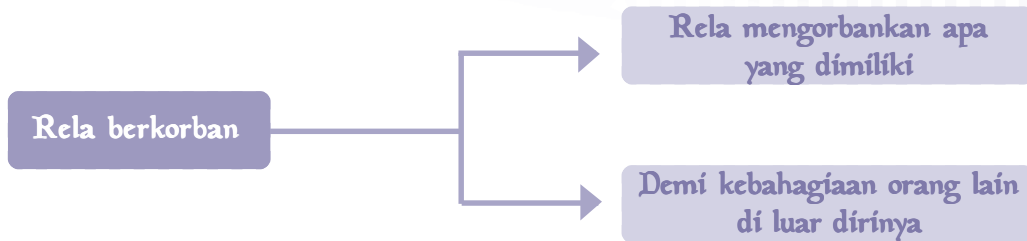
Dalam kehidupan sehari-hari sikap ini perlu kita kembangkan, misalnya dengan cara:

(1) Mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan karena celaka, pingsan, atau karena bencana alam;
(2) Mau mendonorkan darah melalui PMI untuk menolong mereka yang memerlukan bantuan darah;
(3) Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan;
(4) Menjadi anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS);
(5) Menjadi anggota pramuka;
(6) Menyumbang teman yang sakit atau terkena bencana alam;
(7) Membayar iuran Palang Merah Indonesia (PMI);
(8) dan sebagainya.

Contoh-contoh tersebut di atas menunjukkan sikap rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain yang dapat diteladani dari para pejuang bangsa kita.

b. Ciri-ciri Rela Berkorban

Orang yang memiliki sikap rela berkorban memiliki beberapa ciri, di antaranya ialah:

(1) Mendahulukan kepentingan orang banyak atau kepentingan orang lain;
(2) Menghindari sikap egois (sikap mau menang sendiri);
(3) Tidak masa bodoh dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik;
(4) Bersikap sabar dalam menghadapi persoalan hidup;
(5) Tidak mengharapkan imbalan dalam melakukan pekerjaan sosial.

Sikap rela berkorban sangat penting bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. Sikap ini menunjukkan sikap peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini menjadi dasar bagi tumbuhnya rasa cinta Tanah Air dan Bangsa.

c. Contoh Sikap Rela Berkorban

Perhatikan beberapa kutipan peristiwa berikut ini.

(1) Suatu hari Komar terjatuh saat bermain bola. Kakinya luka dan mengeluarkan banyak darah. Soleh menolong Komar dengan cara menahan keluarnya darah dari tubuh Komar. Karena darah terus mengalir, Soleh menggunakan kaos bajunya untuk menutup darah yang keluar dari tubuh Komar.

(2) Isteri Pak Dani mengalami pendarahan hebat ketika baru melahirkan. Ia sangat memerlukan darah. Cadangan darah di PMI sudah habis. Jika tidak ada yang mendonorkan darah, PMI tidak akan mengeluarkan cadangan yang tersimpan. Pak Dani menelpon beberapa orang temannya, diantaranya ialah Pak Toni. Dengan serta merta, Pak Toni bersedia mendonorkan darahnya.

(3) Mustika jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit. Teman-teman Mustika mendoakan agar Mustika lekas sembuh. Mereka juga mengumpulkan uang untuk membantu Mustika.

Ketiga contoh kasus di atas menggambarkan sikap rela berkorban untuk orang lain. Baik Soleh, Pak Toni, maupun teman-teman Mustika , mereka menunjukkan sikap rela berkorban. Soleh rela menolong temannya yang jatuh sampai mengorbankan kaos bajunya untuk menutup aliran darah dari tubuh Komar. Pak Toni rela mengorbankan darahnya untuk menolong orang lain. Dan teman-teman Mustika rela mengorbankan sebagian uangnya untuk menyumbang teman yang sakit.

Sukakah kamu melakukan hal seperti tersebut di atas?

2. Semangat Kebersamaan

a. Arti dan Makna Kebersamaan

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan orang lain. Perhatikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah manusia yang bisa memenuhi segala kebutuhannya oleh sendiri? Tentu saja tidak, bukan?

Sadar tidak sadar, kita sebagai manusia sangat tergantung kepada orang lain. Coba kita renungkan sejenak, dapatkah kita berpakaian jika tidak ada penjahit yang menjahit pakaian kita? Dapatkah kita makan tanpa ada petani yang menanam padi? Dapatkah kita melewati jalan beraspal jika tidak ada orang lain yang membangun jalan tersebut? Tentu tidak bisa, bukan? Karena manusia tergantung hidupnya kepada orang lain, maka kita harus mau membangun semangat kebersamaan.

Apakah semangat kebersamaan itu? Semangat kebersamaan adalah cara hidup bersama yang dilandasi sikap saling menghormati, saling menolong, dan saling berbagi antara manusia satu dengan manusia lain. Jika kita senang orang lain pun harus merasa senang, jika orang lain susah kita pun turut merasakan susah.

Perhatikan contoh berikut ini!

Contoh 1

Pak Asep orang kaya. Ia hidup di tengah–tengah masyarakat miskin. Setiap panen padi, semua penduduk yang berada di sekitar rumah Pak Asep dibagi hasil panennya. Masyarakat sekitar rumah Pak Asep merasa senang. Akibatnya, mereka pun mengulurkan tangan untuk membantu pekerjaan Pak Asep. Pak Asep dan masyarakat sekitarnya saling menolong, saling berbagi, saling membantu satu sama lainnya.

Contoh 2

Pak Aji bekerjasama dengan Pak Indra. Pak Aji sebagai penulis buku, sedangkan Pak Indra sebagai penerbit buku. Pak Aji menulis buku untuk diterbitkan oleh Pak Indra. Mereka bekerjasama. Jika ada buku–buku yang harus diperbaiki Pak Aji memperbaikinya dengan sungguh–sungguh. Pak Indra juga sangat mengerti dengan jerih payah dan pengorbanan Pak Aji. Pak Aji mendapatkan royalti pembayaran hasil penjualan 10 persen bruto. Suatu hari buku Pak Aji dibeli oleh proyek negara sehingga Penerbit mendapat keuntungan Rp 500 juta. Dari keuntungan itu, Pak Aji mendapat bagian sebesar Rp 50 juta rupiah.

Dari kedua contoh kasus di atas, tergambar semangat kebersamaan. Mereka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*). Perhatikan kembali contoh kasus Pak Asep di atas. Sebagai orang kaya Pak Asep mau berbagi dengan mereka yang miskin, sementara itu mereka yang miskin pun mau membantu Pak Asep yang kaya. Dalam kasus ini, semangat kebersamaan dan saling menolong

tergambar jelas. Demikian pula dengan kasus Pak Aji dan Pak Indra. Mereka begitu saling memahami, saling menghargai, dan saling terbuka satu sama lain. Inilah suasana kehidupan yang didasarkan semangat kekeluargaan.

Sukakah kamu dengan sikap seperti itu?

c. Semangat Kebersamaan di Kalangan Siswa

Sebagai siswa, kamu pun harus memiliki semangat kebersamaan. Sebab, jika semangat ini sangat menguntungkan bagi kehidupan kita bersama. Coba bayangkan dengan saksama, jika di dalam kelas kalian setiap siswa saling menghormati, saling membantu, dan saling berbagi, tidak ada yang culas, tidak ada yang merugikan orang lain. Tentu suasananya akan indah dan nyaman. Kita merasa senang berada dalam kelas yang demikian itu.
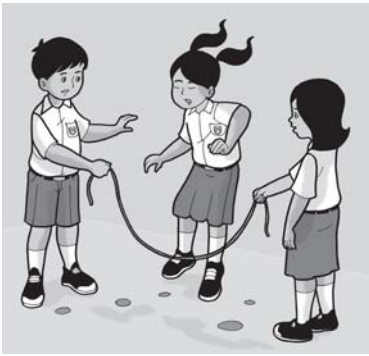
Gambar 1.1 Pelajar sedang main bersama dalam suasana kebersamaan

Semangat kebersamaan di lingkungan pelajar antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk:

(1) Saling mendoakan dan menengok teman jika sakit;
(2) Saling menolong teman yang kurang mampu;
(3) Jika punya makanan saling berbagi dengan teman;
(4) Saling menjaga nama baik dan kehormatan teman;
(5) hidup rukun dan tidak suka bertengkar.

Dalam budaya masyarakat bangsa kita, ada beberapa pepatah yang menggambarkan sikap kebersamaan ini, di antaranya:

(1) Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi;
(2) Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing;
(3) Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh;

Dapatkah kamu menerangkan arti pepatah tersebut?

3. Bersikap Ikhlas

a. Makna Ikhlas

Apakah ikhlas itu?

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, kata ikhlas mengandung arti tulus hati atau dengan hati yang bersih. Sementara ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa ikhlas berarti rela hati dalam menerima, melakukan, dan meninggalkan sesuatu.

Dari kedua pengertian tersebut dapatlah ditarik beberapa pengertian mengenai konsep keikhlasan ini, yakni:

(1) Ikhlas berarti tidak mengharapkan imbalan dari makhluk (sesama manusia);
(2) Ikhlas berarti adanya kebersihan hati, terbebas dari motif-motif buruk;
(3) Ikhlas berarti melakukan, menerima, atau meninggalkan sesuatu dengan senang hati (gembira).

Perhatikan beberapa cerita berikut ini!

(1) Bu Rita sangat rajin mengajar siswa kelas 5. Ia melakukannya dengan senang hati, tidak merasa terpaksa, tidak tertekan. Bu Rita dapat menikmati pekerjaannya sebagai guru kelas 5.
(2) Biasanya Tia diberi uang saku sebesar Rp 10.000,00 oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena orang tuanya sedang lesu usahanya, Tia diberi uang saku Rp 5.000,00 sehari. Tia menerima dengan kesadaran hati, ia tidak ketus atau merasa kekurangan dengan uang pemberian orang tuanya. Ia memanfaatkan uang pemberian orang tuanya dengan baik.
(3) Dulu Murni anak yang suka malas sekolah. Setiap seminggu pasti saja ada hari bolosnya. Sekarang Murni telah mengubah dirinya sendiri. Ia menjadi anak yang rajin sekolah. Ia datang pagi-pagi sekali ke sekolah. Murni menikmati kebiasaan yang baru sebagai siswa disiplin.

Ketiga cerita di atas menunjukkan sikap ikhlas. Pada cerita pertama, Bu Rita dengan ikhlas ia melakukan pekerjaan sebagai guru. Ia dapat menikmati pekerjaannya. Cerita kedua, Tia begitu ikhlas menerima pemberian dari orang tuanya, dan pada cerita tiga, Murni meninggalkan kebiasaan buruknya dengan rela hati dan senang.

b. Manfaat Sikap ikhlas

Apa manfaat sikap ikhlas dalam kehidupan?

Bersikap ikhlas dalam melakukan, menerima, dan meninggalkan sesuatu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, di antaranya ialah:

1) *Meringankan beban pekerjaan*

Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan terasa ringan. Sebaliknya, jika dilakukan dengan hati yang tidak tulus akan terasa berat dan menindih pundak kita. Melakukan pekerjaan yang kecil dan ringan sekalipun, jika dilakukan dengan

hati yang tidak ikhlas, maka akan terasa berat. Sebaliknya, seberat dan sebesar apa pun pekerjaan yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas, maka akan terasa ringan dan nikmat.

Oleh sebab itu, jika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan ikhlas, jangan melakukan suatu pekerjaan dengan hati yang tidak ikhlas.

2) *Meningkatkan kualitas pekerjaan*

Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan memiliki bobot kualitas yang baik. Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan dengan keterpaksaan akan berkualitas rendah.

Dalam beragama, keikhlasan merupakan salah satu syarat sahnya suatu ibadah. Ibadah yang tidak didasarkan pada keikhlasan, tidaklah mendapatkan pahala dari Allah swt.

3) *Menenteramkan hati*

Hati orang yang melakukan, menerima, dan meninggalkan sesuatu dengan ikhlas akan terasa tenang dan tenteram, tidak merasa terpaksa. Ia melakukan pekerjaan, menerima, dan meninggalkan sesuatu dengan nikmat dan hati yang rela. Ia tidak merasa takut apa pun karena berada pada posisi yang benar.

4) *Menjauhkan sikap Riya*

Sikap riya atau ingin dipuji oleh orang lain adalah sikap buruk dalam pandangan agama. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas akan terbebas dari sikap riya ini. Ia bekerja tidak dipengaruhi oleh orang lain, akan tetapi didasarkan pada ketulusan hati sanubarinya.

Sikap riya ini membakar pahala kebajikan kita seperti api membakar kayu bakar, oleh sebab itu, dengan sikap ikhlas ini kita terbebas dari sikap riya yang merusak itu.

c. Perwujudan Sikap Ikhlas dalam Kehidupan

Sikap ikhlas harus senantiasa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat.

Bagi pelajar SD Kelas 6, sikap ikhlas antara lain dapat diwujudkan dengan cara seperti di bawah ini.

1. Senantiasa merasa senang bila turut dalam kegiatan upacara keagamaan dan nasional;
2. Tidak munafik (berpura-pura) dalam menolong orang lain;
3. Tulus hati dalam berucap, bersikap, dan bertindak;
4. Senantiasa memberikan dengan tulus hati kepada orang yang berhak mendapatkan suatu jabatan atau kedudukan;
5. Tidak mengharapkan imbalan atas segala apa yang dikerjakannya.

4. Bersikap Gigih

Salah satu sikap yang dimiliki para pejuang kita ialah gigih dalam perjuangan sampai mencapai apa yang dituju. Untuk mewarisi sikap ini, marilah kita kaji uraian berikut.

a. Makna Sikap Gigih

Untuk memahami sikap gigih, baiklah kita simak cerita berikut ini dengan baik!

Cerita 1

Sinta seorang siswa Kelas 6 SD. Ia sangat tekun dalam belajar. Ia bercita-cita ingin menjadi bintang kelas. Setiap waktu ia berlajar keras, tanpa mengenal bosan. Siang dan malam selalu ia gunakan untuk belajar. Meskipun kadang-kadang banyak godaan yang mengganggu dirinya dalam belajar, Sinta tetap berusaha keras sampai cita-citanya tercapai. Dan cita-cita Sinta tercapai, yaitu menjadi bintang kelas. Sinta menjadi siswa terpandai dan terbaik di kelasnya.

Cerita 2

Sendi sangat kurang peduli dengan dirinya sendiri. Jika diberi PR oleh guru tidak segera ia kerjakan. Ia mudah berputus asa dan menyerah dengan keadaan. Di kelas ia sangat pasif. Jika ada pelajaran yang sulit, Sendi segera berputus asa, sehingga sering tidak sekolah.

Kedua cerita di atas menunjukkan sikap gigih dan sikap tidak gigih. Cerita 1 merupakan contoh sikap gigih. Sinta begitu kukuhnya ia dalam mencapai apa yang ia cita-citakan (harapkan). Sebaliknya, cerita 2 menunjukkan sikap tidak gigih dalam menjalani kehidupannya sebagai pelajar.

Nah, apakah yang dimaksud dengan sikap gigih?

Gigih artinya teguh pendirian dan pikiran akan sesuatu hal (peristiwa). Sinta pada cerita di atas begitu teguh pendirian dan pikiran akan cita-citanya: menjadi bintang kelas. Kegigihannya mengantarkan dirinya kepada keberhasilan. Sebaliknya, Sendi menunjukkan sikap menyerah dan kalah dengan keadaan.

Orang dengan sikap gigih biasanya memiliki ciri-ciri tersendiri, di antaranya:

1) **Suka bekerja keras**

Bekerja keras merupakan salah satu ciri orang gigih. Mustahil seseorang dikatakan gigih apabila ia tidak mau bekerja keras. Orang-orang gigih selalu berusaha seoptimal mungkin dalam mengejar cita-citanya.

2) **Bersabar**

Kegigihan seseorang biasanya ditentukan oleh tingkat kesabarannya. Semakin ia sabar semakin gigih dalam mencapai cita-citanya. Kesabaran merupakan ruhnya kegigihan. Tidak akan bisa gigih seseorang yang tidak memiliki kesabaran.

3) **Pantang menyerah**

Bisakah orang yang mudah menyerah dikatakan sebagai orang yang gigih? Tentu saja tidak. Orang-orang gigih adalah mereka yang pantang menyerah dalam setiap langkah hidupnya. Sebelum apa yang dicita-citakannya tercapai ia tidak pernah mau mengalah atau menyerah.

4) **Teguh pendirian**

Salah satu sikap orang gigih adalah teguh pendirian. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai issue atau pengaruh yang datang dari luar dirinya. Orang gigih pada umumnya adalah mereka yang mampu mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dengan baik. Ia tidak kalah dengan keadaan, tetapi mengalahkan keadaan.

5) **Percaya diri**

Kegigihan merupakan perwujudan sikap percaya diri. Orang yang minder (tidak percaya diri) tidak akan bersikap gigih dalam mengejar cita-cita. Ia akan mudah kalah dengan keadaan. Sebaliknya, mereka yang percaya dirilah yang memiliki sikap gigih. Oleh sebab itu, agar kita bisa bersikap gigih, kita harus memiliki sikap percaya diri.
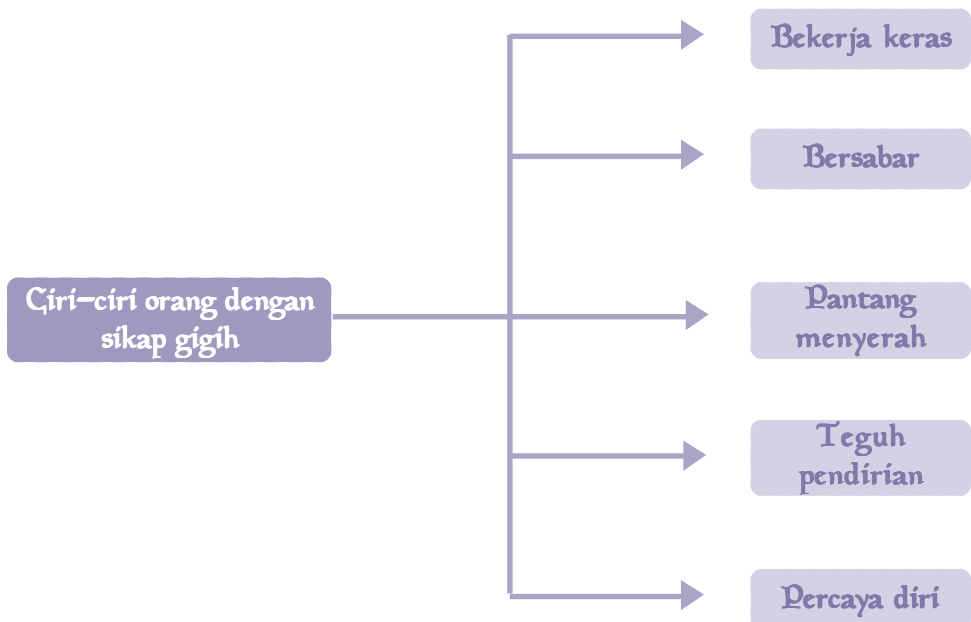
b. Perwujudan Sikap Gigih

Sikap gigih dalam kehidupan siswa (pelajar) dapat diketahui dari indikasi atau tanda-tandanya, di antaranya ialah:

1) Mencapai keinginannya dengan dorongan (motif) yang kuat

Orang dengan jiwa gigih memiliki dorongan atau motif yang kuat dalam mencapai apa yang ia inginkan. Ia menggunakan prinsip "Sekali melangkah pantang menyerah". Sebelum tercapai apa yang menjadi cita-cita dan harapannya, ia terus berjuang sampai tercapai. Dalam kamus hidupnya, tidak kata menyerah. Bagi mereka menyerah berarti kalah.

Orang-orang gigih tidak mau melakukan pekerjaan setengah-setengah. Ia akan melakukannya dengan usaha yang optimal. Wajarlah jika orang-orang gigih pada umumnya bisa menghasilkan hasil yang cukup gemilang.

2) Tidak kenal putus asa

Gigih berarti tidak mengenal sikap berputus asa. Sikap berputus asa sama saja mengubur masa depan sendiri. Karena itu, orang-orang yang gigih tidak suka berputus asa. Daripada dipakai untuk berputus asa lebih baik digunakan untuk mengusahakan apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya.

3) Selalu ulet dalam berusaha

Keuletan adalah salah satu wujud sikap gigih. Orang gigih tidak cepat bosan dan menyerah dalam berusaha. Berbagai cara dan strategi dikerahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ia juga kreatif dalam mencari-cari cara yang paling tepat untuk mencapai cita-citanya.

4) Teguh dalam memegang prinsip

Orang yang berjiwa gigih sangat kuat dalam memegang prinsip. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai AThG yang dating. Suatu prinsip yang sudah diyakini benar tidak akan bisa diubah. Ia kukuh dalam menegakkan prinsip yang diyakininya benar. Wajarlah jika orang gigih biasanya tampak seperti egois. Padahal bukan egois, akan tetapi teguh dalam memegang prinsip.

c. Sikap Gigih dan Keberhasilan dalam Mencapai Cita-cita

Sikap gigih merupakan modal bagi seorang siswa dalam mencapai apa yang dicita-citakannya. Dengan kegigihannya, cita-cita yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan mudah. Oleh sebab itulah, maka orang gigih biasanya lebih cepat berkembang (maju) dibandingkan dengan yang lainnya.

Coba kalian perhatikan orang-orang yang berhasil dalam bidang kehidupan mereka! Apabila kita mau memperhatikannya secara saksama, mereka mencapai keberhasilan karena kegigihannya. Perhatikan kisah berikut!

1. Bung Karno, proklamator bangsa Indonesia, telah berkali-kali ditangkap dan dibuang oleh penjajah karena memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Tetapi, ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang demi bangsa dan negaranya.
2. Para pahlawan bangsa Indonesia dahulu, seperti Diponegoro, Cut Nyak Dien, Hasanuddin, Ketut Jelantik, Tuanku Imam Bonjol, dan yang lainnya adalah contoh orang yang gigih dalam perjuangan. Banyak hambatan dan tantangan yang mereka hadapi. Tetapi, mereka tidak pernah berhenti berjuang demi mengejar cita-cita negara yakni mengusir penjajah.

Tanpa kegigihan orang-orang terdahulu kita tidak dapat menikmati karya di saat ini. Karya-karya besar dan monumental yang kita nikmati saat ini adalah hasil kegigihan manusia-manusia pada zaman dahulu. Ini berarti, bahwa kegigihan dalam melakukan sesuatu sangat besar artinya bagi pencapaian suatu tujuan dan dalam menghasilkan karya-karya besar.

Sebagai pelajar, kalian harus mampu mencontoh kegigihan para pendahulu kita. Mereka yang telah banyak berjasa untuk kita dengan kegigihannya patut kita teladani dengan cara mencontoh sikap gigihnya itu.

Gambar 1.2 Burung Garuda lambang negara kita

Masih banyak nilai-nilai juang yang ditunjukkan oleh para perumus Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai juang itu tercermin dalam sila-sila Pancasila, yakni:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3) Persatuan Indonesia;
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa ialah mengkaji dan mendalami nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita dan mengamal-kannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sukakah kamu mengamalkan nilai-nilai tersebut di atas?

Rangkuman

1. Sesuatu yang berharga dalam usaha mencapai sesuatu disebut nilai-nilai juang.
2. Nilai-nilai juang yang dapat dipetik dari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di antaranya ialah nilai rela berkorban, nilai keikhlasan, nilai kebersamaan, nilai keberanian, pantang menyerah (gigih), dan nilai demokratis.
3. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara prinsip mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok (golongan) dilakukan para pendiri negara kita.
4. Nilai-nilai perjuangan para perumus Pancasila tergambar dalam sila-sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sebagai pelajar dan penerus generasi di masa depan, kita harus mau dan mampu mengamalkan nilai-nilai juang itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun dalam lingkungan kehidupan lainnya.
6. Dengan mengamalkan nilai-nilai juang yang diwariskan para pejuang bangsa kita di masa lalu berarti telah meneruskan perjuangannya.
7. Untuk dapat mengamalkan nilai-nilai juang para pendiri negara kita di masa lalu, kita harus mempelajari dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami kita harus mengamalkannya dalam kehidupan.
8. Para pelajar harus mau mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Siswa

Kegiatan 1

Diskusikan dengan temanmu dalam kelompok hal-hal berikut ini!

No.	Nilai-nilai Juang	Ciri-ciri
1	Keikhlasan	....
2	Kebersamaan	....
3	Gigih	....
4	Rela Berkorban	....
5	Percaya Kepada Tuhan YME	....

Kegiatan 2

Kemukakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tuliskan dalam kotak seperti contoh di bawah ini!

No.	Nama Tokoh	Dalam Peristiwa	Perannya sebagai
1	Mr. Muh. Yamin	Sidang BPUPKI I	Pencetus asas dan dasar negara Pancasila
2			

3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Kegiatan 3

Diskusikan dalam kelompok. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran siswa agar dapat mengamalkan nilai-nilai juang yang telah diwariskan para pendiri negara kita!

Tuliskan hasil diskusi kelompokmu dalam kertas tersendiri. Kumpulkan untuk dinilai.

Kegiatan 4

Kemukakan tanggapanmu terhadap beberapa kasus berikut. Nilai-nilai apa yang ditunjukkan dalam kasus di bawah ini.

1. Dewi menolong temannya yang tertabrak motor. Ia mengantarkan ke Puskesmas. Ia kesiangan datang ke sekolah karena harus menolong temannya yang celaka itu.
   Nilai yang dilakukan Dewi ialah nilai □.
2. Jika ada temannya yang sakit, siswa kelas VI SD Griba menengok temannya yang sakit itu. Mereka mengumpulkan uang untuk menyantuni temannya yang sakit itu.
   Nilai yang dilakukan siswa kelas VI SD Griba ialah nilai □.
3. Ketika melihat ada pengemis tua yang datang ke rumah, Mia memberi santunan tanpa mengharapkan balas jasa.
   Nilai yang diamalkan Mia adalah nilai □.
4. Vika tidak pernah berputus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, meskipun ia tahu bahwa tugas itu berat sekali. Ia tidak pernah menyerah, terus saja ia mencari cara sampai akhirnya mendapatkan apa yang ia cari.
   Nilai yang diamalkan Vika adalah nilai □.

5. Meskipun dikritik pendapatnya, Memey menerima kritikan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ia sadar bahwa dalam musyawarah setiap pendapat memang harus diuji kebenarannya.

   Nilai yang diamalkan Memey ialah nilai □.

Kegiatan 5

Amati gambar tokoh berikut ini, lalu kemukakan nilai juang apa yang paling menarik dari tokoh tersebut! Bila kamu tidak tahu, cari di perpustakaan atau tanyakan pada gurumu!

Sumber: kepustakaan-presiden.pnri.go.id
Mr. Muh. Yamin
(a)

Sumber: cache.viewimages.com
Bung Karno
(b)

Sumber: upload.wikimedia.org
Bung hatta
(c)

Sumber: www.deplujunior.org
Achmad Subardjo
(d)

Sumber: kepustakaan-presiden.pnri.go.id
K.h. Agus Salim
(e)

Sumber: Arsip Nasional
dr. K.R.T. Rajiman Wediodiningrat
(f)

1. Nilai-nilai juang yang paling kamu kagumi dari gambar (a) ialah ....
2. Nilai-nilai juang yang paling kamu kagumi dari gambar (b) ialah ....
3. Nilai-nilai juang yang paling kamu kagumi dari gambar (c) ialah ....
4. Nilai-nilai juang yang paling kamu kagumi dari gambar (d) ialah ....
5. Nilai-nilai juang yang paling kamu kagumi dari gambar (e) ialah ....
6. Nilai-nilai juang yang paling kamu kagumi dari gambar (f) ialah ....

Latihan Bab I

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! Kerjakan pada kertas lain!

1. Dalam proses mempersatukan berbagai perbedaan saat perumusan dasar negara Pancasila, nilai juang yang menonjol ialah nilai ....
   a. ketuhanan
   b. rela berkorban
   c. kebersamaan
   d. keikhlasan
2. Yang dimaksud dengan nilai juang adalah sesuatu yang ....
   a. berharga dalam perjuangan
   b. berguna dalam perjuangan
   c. menghambat perjuangan
   d. menjadi alat perjuangan
3. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui tahapan sidang berikut, *kecuali* ....
   a. BPUPKI I
   b. Panitia Sembilan
   c. PPKI
   d. Konstituante
4. Dasar negara Republik Indonesia hendaknya diberi nama Pancasila. Pendapat ini dikemukakan oleh ....
   a. Drs. Moh. Hatta
   b. Mr. Muh. Yamin
   c. Mr. A. Subarjo
   d. Ir. Soekarno
5. Berikut nilai-nilai perjuangan yang tidak menjiwai para pejuang kemerdekaan pada saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yakni ....
   a. pamrih
   b. keikhlasan
   c. kegigihan
   d. kebersamaan
6. Perwujudan nilai kebersamaan dalam kehidupan siswa contohnya ....
   a. menengok teman yang sakit
   b. menolong orang yang sedang berkelahi
   c. memberi makan fakir miskin
   d. membantu teman yang sedang ulangan
7. Untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, nilai juang yang patut dimiliki bangsa Indonesia ialah ....
   a. kegigihan
   b. rela berkorban
   c. keikhlasan
   d. kebersamaan

8. Yang tidak termasuk sikap gigih ialah ....
   a. sabar dan ulet
   b. mudah bosan
   c. tak mudah bosan
   d. pantang menyerah
9. Yang bukan nilai-nilai Pancasila, ...
   a. Ketuhanan
   b. Kemanusiaan
   c. Kebangsaan
   d. Kebebasan mutlak
10. Bukti yang menunjukkan bahwa dalam proses perumusan dasar negara para pejuang bangsa kita menjunjung nilai kebersamaan ialah diubahnya sila Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ....
    a. Ketuhanan yang berkeadilan
    b. Ketuhanan Yang Maha Esa
    c. Ketuhanan yang kebudayaan
    d. Ketuhanan yang berkemanusiaan
11. Ketika hendak pergi ke sekolah, Mulki menolong anak yang tertabrak sepeda motor. Akibatnya, ia terlambat masuk sekolah. Nilai perjuangan yang dilakukan Mulki adalah nilai ....
    a. keadilan
    b. rela berkorban
    c. keberanian
    d. kebersamaan
12. Dalam berdiskusi, Dewi tidak marah meskipun pendapatnya dikritik oleh Dadang, karena Dewi mengamalkan nilai juang, yakni nilai ....
    a. demokratis
    b. keadilan
    c. persatuan
    d. kemanusiaan
13. Agar dapat menyelesaikan krisis di Indonesia, nilai juang yang perlu dimiliki bangsa kita saat ini ialah nilai ....
    a. kebersamaan
    b. kemanusiaan
    c. keadilan
    d. keikhlasan

14. Dalam budaya bangsa Indonesia terdapat peribahasa yang menunjukkan nilai kebersamaan dalam kehidupan, *kecuali* ....
    a. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
    b. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah
    c. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian
    d. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
15. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang sah, yakni pada alinea ....
    a. pertama
    b. kedua
    c. ketiga
    d. keempat

B. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Yang dimaksud dengan nilai juang adalah ....
2. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita dapat memetik nilai juang, yakni nilai ....
3. Bukti bahwa dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara para pejuang kita menggunakan nilai kebersamaan ialah ....
4. Nilai gigih antara lain dapat terlihat dari ciri-cirinya, yakni ....
5. Usulan 5 asas dan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI I dikemukakan oleh ...., ..., ..., dan ....
6. Yang mengusulkan agar lima asas berdirinya negara diberi nama Pancasila ialah ....
7. Sidang Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 melahirkan hasil yang disebut ....
8. Rumusan Pancasila yang sah termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke ....
9. Nilai-nilai Pancasila yang mengatasi berbagai paham dan golongan ialah nilai ....
10. Nilai dalam Pancasila yang melandasi pejuang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara dalam sidang PPKI ialah nilai ....

C. Essay

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Jelaskan arti nilai juang!
2. Jelaskan 4 nilai juang yang digunakan para pejuang bangsa Indonesia saat merumuskan dasar negara Pancasila!
3. Jelaskan makna nilai kebersamaan!

4. Kemukakan ciri-ciri nilai kebersamaan!
5. Jelaskan arti dan makna ikhlas!
6. Kemukakan ciri-ciri sikap ikhlas!
7. Jelaskan makna sikap gigih!
8. Mengapa kita harus bersikap gigih dalam belajar?
9. Apakah yang dimaksud dengan rela berkorban?
10. Kemukakan 3 contoh perilaku yang didasari sikap rela berkorban!

Sistem Pemerintahan Indonesia

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata "demos" yang artinya rakyat dan "kratos/ kratein" yang artinya memerintah/pemerintahan. Demokrasi yang dianut bangsa kita adalah demokrasi perwakilan, sehingga di Indonesia diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat, di Indonesia pemilu tidak hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah.

Menurut UUD 1945, di Indonesia terdapat lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara. Lembaga-lembaga negara inilah yang mengendalikan kehidupan negara kita.

Di tingkat daerah, terdapat pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerah masing-masing.

Antara daerah dan pusat terdapat pembagian kekuasaan dalam menyelenggarakan negara. Pemerintahan pusat menjalankan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan pemerintahan daerah menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan makna dan tujuan pemilihan umum;
2. menjelaskan asas pemilihan umum;
3. menjelaskan hak pilih dalam pemilu;
4. menjelaskan proses pemilihan Kepala Daerah;
5. mendeskripsikan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 yang disempurnakan;
6. mengemukakan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945;
7. mengemukakan tugas dan fungsi pemerintah pusat;
8. mengemukakan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Yang Dipelajari dalam Bab Ini (Peta Konsep)

- **Sistem Pemerintahan Indonesia**
  - **Pemilihan Umum**
    - Makna Pemilu
    - Sejarah Pemilu
    - Asas Pemilu
    - Penyelenggara Pemilu
    - Pemilihan Kepala Daerah
  - **Pemerintahan Negara**
    - Tingkat Pusat
    - Tingkat Daerah

Kata-kata Kunci:
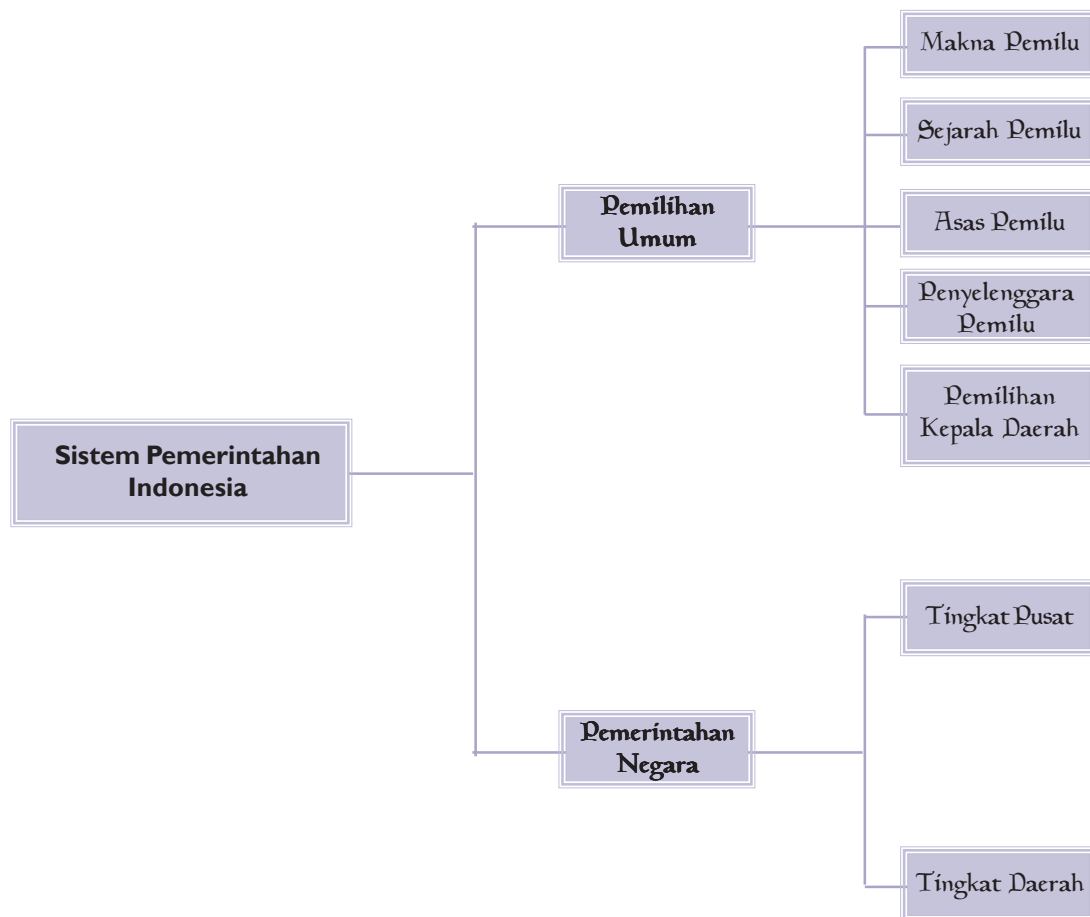
- ☐ pemilu
- ☐ lembaga negara
- ☐ lembaga yudikatif
- ☐ pemerintah pusat
- ☐ pemerintah daerah
- ☐ demokrasi
- ☐ lembaga legislatif
- ☐ lembaga eksekutif

A Pemilihan Umum di Indonesia

Mengapa di Indonesia diadakan pemilihan umum? Apakah pemilihan umum itu? Apa tujuan diadakannya pemilihan umum?

1. Makna Pemilihan Umum

Negara Indonesia menganut asas demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi berasal dari kata "demos" yang artinya rakyat dan "kratos/kratein" yang berarti memerintah/pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti rakyat yang memerintah atau pemerintahan rakyat.

Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi perwakilan, di mana rakyat tidak langsung turut serta dalam pemerintahan, tetapi mewakilkannya kepada wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan (DPR/DPRD).

Untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan dan menentukan pemimpin negara itulah diadakan pemilihan umum (pemilu). Di Indonesia, pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E menyebutkan:

(1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum disebutkan, Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bagaimana Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia?

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, untuk pertama kali pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan dalam dua tahap.

a. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
b. Tahap II tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemilihan umum di Indonesia berturut-turut dilaksanakan seperti di bawah ini.

a. Tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan golongan karya.
b. Tahun 1977 diikuti oleh 2 partai politik dan golongan karya.
c. Tahun 1982 diikuti oleh 2 partai politik dan golongan karya.
d. Tahun 1987 diikuti oleh 2 partai politik dan golongan karya.
e. Tahun 1992 diikuti oleh 2 partai politik dan golongan karya.
f. Tahun 1997 diikuti oleh 2 partai politik dan golongan karya.
g. Tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik.
h. Tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Apa tujuan diselenggarakannya pemilihan umum?

Dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 disebutkan dengan jelas bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih:

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
b. anggota Dewan Perwakilan Daerah;
c. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan memilih Presiden serta Wakil Presiden baru dilaksanakan di Indonesia sejak pemilihan umum (pemilu) tahun 2004. Sebelum tahun 2004, pemilu hanya untuk memilih anggota-anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengapa presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum? Apa tujuan utamanya?

4. Asas Pemilihan Umum

Menurut pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Apakah arti dan makna dari asas-asas tersebut?

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Jadi, apabila seseorang sakit dan tidak memungkinkan memberikan suaranya dalam pemilihan umum, ia tidak dapat diwakili suaranya oleh orang lain. Ia harus langsung memberikan suaranya. Bila ia tuna netra (tidak dapat melihat) atau cacat fisik lainnya, ia dapat meminta tolong orang lain dalam memberikan suaranya, tetapi ia sendiri berada di tempat pemungutan suara (ke bilik suara).

Sumber: www.kutaikartanegara.com

Gambar 2.1 Pemilih sedang memberikan suaranya di TPS

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi (membeda-bedakan) berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Menurut Undang-undang orang yang memenuhi syarat menjadi pemilih adalah mereka yang:

1. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah/pernah kawin;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Terdaftar sebagai pemilih.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peratuan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Asas-asas tersebut hendaknya mewarnai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), sehingga pemilu berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

5. Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat "nasional" dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sifat "tetap" dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat "mandiri" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPU tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, akan tetapi juga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan di tempat pemungutan suara dibentuk panitia tersendiri. Panitia yang dimaksud ialah:

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk di tingkat kecamatan.
b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk di tingkat desa/kelurahan
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebagai bahan perbandingan, perhatikan penyelenggara Pemilu Tahun 1999 dan 2004

No.	Tingkat	1999	2004
1	Pusat	LPU/PPI	KPU Pusat
2	Propinsi	PPD I	KPU Propinsi
3	Kabupaten/Kota	PPD II	KPU Kab/Kota
4	Kecamatan	PPK	PPK
5	Desa/Kelurahan	PPS	PPS
6	TPS	KPPS	KPPS

Keterangan:

1. LPU Lembaga Pemilihan Umum.
2. PPI Panitia Pemilihan Umum Indonesia
3. PPD Panitia Pemilihan Daerah
4. PPK Panitia Pemilihan Kecamatan
5. PPS Panitia Pemungutan Suara
6. KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Keanggotaan Penyelenggara Pemilu

No.	Penyelenggara Pemilu	Jumlah Anggota
1	KPU Pusat	11 orang
2	KPU Propinsi	5 orang
3	KPU Kab/Kota	5 orang
4	PPK	5 orang
5	PPS	3 orang
6	KPPS	7 orang

Untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan umum dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan.

6. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Hak pilih dalam pemilihan umum dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

- Hak pilih aktif, yaitu hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (hak memilih);
- Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat atau Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.
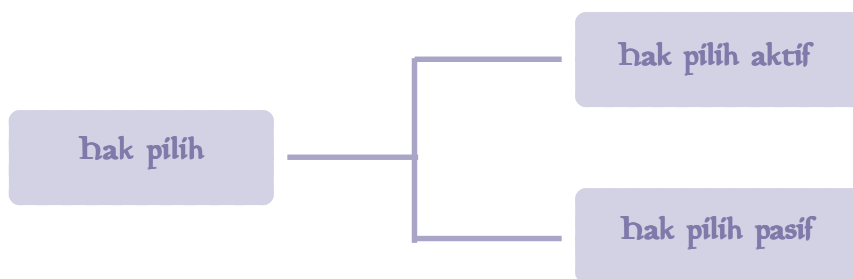
Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Seorang yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah warga negara yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Berusia serendah-rendahnya 17 tahun pada saat pemilihan umum dilaksanakan dan/atau sudah/pernah kawin.

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak memenuhi syarat di atas tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

7. Proses Pemilu

Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia dilakukan melalui tahapan–tahapan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Pemilih;
b. Penetapan Calon Pemilih;
c. Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
d. Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
e. Kampanye Pemilu;
f. Pelaksanaan Pemilu;
g. Penghitungan Suara;
h. Penetapan kursi dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
i. Pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun tahapan pemilihan Presiden/Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

a. Pendataran Pemilih;
b. Penetapan Calon Pemilih;
c. Pendaftaran Calon Presiden/Wakil Presiden;
d. Penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden;
e. Kampanye Pemilu;
f. Pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden;
g. Penghitungan Suara;
h. Penetapan Presiden/Wakil Presiden Terpilih;
i. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

8. Komisi Pemilihan Umum

Siapakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu? Apa tugas dan fungsinya?

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Keberadaannya dijamin oleh UUD 1945 pasal 22E ayat (5). Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Keanggotaan KPU terdiri atas 11 orang dari tokoh nasional yang bersifat independen. Tugas utamanya ialah melaksanakan pemilihan umum, baik untuk pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif.

Di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

9. Pemilihan Kepala Daerah

Bagaimana pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan?

Menurut pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jadi, penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) adalah KPU Provinsi. Sedangkan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota.

Untuk mengawasi jalannya pemilihan Kepala Daerah dibentuklah panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.

Keanggotaan Panwas Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala

No.	Tingkat	Jumlah Anggota
1	Provinsi	5 orang
2	Kabupaten/Kota	5 orang
3	Kecamatan	3 orang

Untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut ini.

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;

c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. Menyerahkan Daftar Riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan
p. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Sumber: samiajibintang.files.wordpress.com

Gambar 2.2 Kampanye Pilkada Aceh

Bagaimana jika ada persyaratan yang kurang, dapatkah dicalonkan? Apa alasannya?

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan melalui tahapan seperti berikut:

a. Penetapan Daftar Pemilih;
b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
c. Kampanye;
d. Pemungutan Suara;
e. Penghitungan Suara;
f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Persyaratan pemilih untuk pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah sama dengan persyaratan untuk pemilihan umum biasa. Hanya bedanya, kalau pemilihan kepala daerah provinsi, yang berhak memilih adalah warga provinsi tersebut. Demikian pula dalam pemilu kepala daerah kabupaten/kota, yang berhak memilih adalah warga kabupaten/kota yang bersangkutan saja.

Mengapa harus demikian? Coba diskusikan dengan teman sebangkumu!

10. Pemilu dalam Kehidupan Bangsa Indonesia

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi dalam pemerintahannya, pemilihan umum merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

Pemilu di Indonesia tidak hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat saja, tetapi juga untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota/Bupati dan Wakil Bupati, bahkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dimulai tahun 2004. Demikian pula pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada ini baru dimulai sejak lahirnya UU No.32 tahun 2004.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu Kepala Daerah masih diwarnai dengan berbagai masalah. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih belum cerdas dan dewasa dalam berpolitik.

Apa buktinya bahwa bangsa kita belum cerdas dalam berpolitik sehingga dalam Pilkada sering menimbulkan masalah?

B Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaga-lembaga negara apa saja yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen? Apa tugas dan wewenangnya?

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen terdapat lembaga-lembaga negara dengan tugsa dan wewenang yang berbeda-beda. Lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Lembaga-lembaga negara tersebut meliputi:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, pengaturan mengenai Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) termuat dalam pasal 2 dan pasal 3.

Menurut pasal 2 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusywaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Berdasar keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

a. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
b. Anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum;
c. Dalam lima tahun, MPR bersidang sedikit-dikitnya satu kali;
d. Sidang MPR dilakukan di ibu kota negara;
e. Segala putusan MPR dilakukan dengan suara terbanyak.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 2.3 Gedung MPR/DPR

Tugas dan wewenang MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
c. dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Jika membaca keterangan tersebut, siapa yang lebih tinggi kedudukannya antara Presiden dengan MPR?

2. Presiden dan Wakil Presiden

Tahukah kamu siapa presiden RI sekarang? Bagaimana kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam tata pemerintahan negara Indonesia?

Presiden adalah kepala eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Kepala ekesekutif artinya kepala pemerintahan yang melaksanakan undang-undang. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bolehkah calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dicalonkan oleh partai politik? Apa alasannya?

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat selama dua periode (10 tahun). Bila telah menjabat selama dua periode (10 tahun), ia tidak boleh dicalonkan lagi.

Bagaimana bila rakyat masih menghendaki Presiden dan Wakil Presiden untuk menjabat kembali?

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila:

a. terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan atau menerima penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela;
b. terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sumber: beritasore.com

Gambar 2.4 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Tugas presiden dibedakan ke dalam dua bagian, yakni sebagai "kepala pemerintahan" dan sebagai "kepala negara".

a. Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai Kepala Pemerintahan presiden memiliki tugas sebagai berikut:

1) memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 4 ayat 1 UUD 1945);
2) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2 UUD 1945);

3) Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (pasal 16);
4) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2);
5) Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 5 ayat 1);
6) Bersama-sama DPR menyetujui setiap rancangan undang-undang (Pasal 20 ayat 2);
7) Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR (Pasal 20 ayat 4);
8) Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat 1);
9) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat 1);
10) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

b. Sebagai Kepala Negara

Sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai tugas dan wewenang seperti berikut:

1) Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1);
2) Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1);
3) Menerima duta dari negara lain (Pasal 13 ayat 3);
4) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15);
5) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)
6) Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1);
7) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Apa tugas dan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat?

Menurut pasal 19 ayat 1 UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan susunannya diatur dengan undang-undang. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

DPR merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang) yang mencakup:

a. membahas dan menyetujui bersama rancangan undang-undang yang diajukan presiden;
b. memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20A ayat 1).

Dari sudut pandang ketatanegaraan, DPR mempunyai fungsi seperti berikut:

a. Fungsi legislasi atau pembuat Undang-Undang;
b. Fungsi control atau mengawasi pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden);
c. Fungsi perwakilan (representasi) dari rakyat Indonesia.

DPR juga memiliki hak. hak-hak DPR adalah seperti berikut:

a. hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan udang-undang kepada presiden/pemerintah;
b. hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan presiden/pemerintah;
c. hak budget, yaitu hak DPR untuk mengajukan anggaran (RAPBN);
d. hak amandemen, yaitu hak DPR untuk menilai atau mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang;
e. hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden;
f. hak Petisi, yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil pemerintah/Presiden.

Sumber: windede.com

Gambar 2.5 Sidang DPR

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Apa itu BPK? Apa saja fungsi dan tugasnya?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang bertanggung jawab memeriksa keuangan negara. Badan ini memeriksa semua pelaksanaan APBN. hasil pemeriksanaannya diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai bahan penilaian atau pengawasan dalam pembahasan RAPBN tahun berikutnya.

Kedudukan BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Artinya, bebas dari pengaruh pemerintah, tetapi tidak boleh memerintah kepada Presiden/Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bertanggung jawab kepada BPK.

Selain memeriksa keuangan negara, BPK juga mengatur tentang pajak serta hal-hal keuangan lainnya sesuai dengan undang-undang.

5. Mahkamah Agung (MA)

Siapa Mahkamah Agung itu? Apa tugas, peran, dan fungsinya?

Dalam pasal 24 UUD 1945 disebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka atau lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yudikatif (mengadili pelanggar undang-undang). Menurut pasal 28 – 29 UU Nomor 14 tahun 1985, tugas dan wewenang MA antara lain:

a. Memeriksa dan memutuskan:
   1) permohonan kasasi;
   2) sengketa tentang kewenangan mengadili;
   3) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Gambar 2.6 Sidang Mahkamah Agung

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, menurut UUD 1945 hasil perubahan terdapat lembaga-lembaga lainnya, yakni:

6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Siapa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu? Apa tugas, peran, dan fungsinya?

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak boleh lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jika anggota DPR ada 600 orang, maka anggota DPD tidak boleh lebih dari 200 orang.

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain mengajukan RUU tersebut, DPD juga turut membahas dan mengawasi pelaksanaan UU tersebut.

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Apa itu Mahkamah Konstitusi? Apa tugas, fungsi, dan perannya?

Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Jadi, apa tugas pokok Mahkamah Konstitusi? Diskusikan dengan temanmu!

8. Komisi Yudisial

Siapa Komisi Yudisial itu? Apa tugas dan fungsinya?

Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

C Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, pemerintahan memiliki fungsinya masing-masing.

1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pusat

Apa saja tugas dan fungsi pemerintahan pusat?

Secara garis besar, fungsi pemerintahan pusat ada tiga macam, yaitu:

a. Fungsi legislatif, yaitu fungsi membuat undang-undang;
b. Fungsi eksekutif, yaitu fungsi melaksanakan undang-undang; dan
c. Fungsi yudikatif, yaitu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Berkenaan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif, maka MPR, DPR, dan DPD melaksanakan tugasnya sebagai lembaga legislatif. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga ini telah dibahas pada uraian mengenai lembaga-lembaga negara.

Fungsi eksekutif dijalankan oleh Presiden/Wakil Presiden dan para menteri/kabinet. Mengenai tugas dan wewenang Presiden/Wakil Presiden juga sudah dijelaskan dalam pembahasan materi lembaga-lembaga negara.

Fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Makkamah Konstitusi telah diuraikan terdahulu.

Dalam tata pemerintahan Indonesia terdapat keunikan tersendiri, yakni pada lembaga Presiden. Selain sebagai lembaga eksekutif ternyata Presiden diberi tugas legislatif dan yudikatif, meskipun untuk menjalankan fungsi tersebut harus ada konsultasi dengan lembaga terkait. Sebagai contoh, dalam keadaan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang. Presiden juga menetapkan berbagai peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang.

Mengapa Presiden diberi tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Apa tujuannya?

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah

Siapa saja pemegang fungsi pemerintahan daerah?

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah sebagai kepala pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekutif di daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislatif.

Dalam menjalankan fungsi eksekutif, Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi legislatif, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Mentri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Dalam pemerintahan desa, pemegang fungsi eksekutif adalah kepala desa, sedangkan pemegang fungsi legislatif adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rangkuman

1. Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam pemerintahannya. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, tetapi sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan. Untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan diadakan pemilihan umum.
2. Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Asas pemilu meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pemilihan umum pertama kali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan dalam pemilu tahun 2004. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
6. Menurut UUD 1945 lembaga-lembaga negara yang menjalankan tugas pemerintahan pusat ialah MPR, DPR, Presiden, BPK, MA ditambah dengan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD, dan Komisi Pemilihan Umum.
7. Secara umum fungsi pemerintahan dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Karena perbedaan fungsi, maka tugas dan wewenangnya pun berbeda.
8. Di daerah, pemegang kekuasaan pemerintahan ialah kepala daerah dan DPRD. Kepala Daerah sebagai pemegang fungsi eksekutif, sedangkan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif.
9. Di tingkat desa, pemegang kekuasaan eksekutif adalah kepala desa, sedangkan pemegang kekuasaan legislatif adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
10. Pembedaan fungsi pemerintahan dilakukan agar semua tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai.

Kegiatan Siswa

Kegiatan 1

Temukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemenkan, lalu temukan informasi berikut:

1. Apa saja lembaga-lembaga negara yang termuat dalam UUD 1945?
2. Kemukakan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Tuliskan pula tugas dan wewenang MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Kegiatan 2

Temukan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Nomor 12 tahun 2003), lalu galilah informasi berikut ini:

1. Kemukakan tugas KPU Pusat
2. Kemukakan tugas KPU Provinsi
3. Kemukakan tugas KPU Kabupaten/Kota

Kegiatan 3

Pelajari UU Pemilu, lalu kemukakan syarat-syarat menjadi anggota KPU.

Kegiatan 4

Temukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 tahun 2004), lalu galilah informasi berikut ini.

1. Kemukakan pelaksana pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Apa tugas KPUD, PPK, dan PPS dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kegiatan 5

Setelah kalian mempelajari Bab ini, coba kalian kemukakan beberapa kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan demokrasi. Diskusikan dengan teman kalian. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam format seperti contoh berikut.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Demokrasi	Kelemahan Sistem Pemerintahan Demokrasi

Latihan Bab 2

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! Tuliskan dalam kertas lain!

1. Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia dalam pemerintahannya ialah sistem demokrasi ....
   a. ekonomi
   b. langsung
   c. politik
   d. perwakilan
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan setiap ....
   a. 3 tahun sekali
   b. 4 tahun sekali
   c. 5 tahun sekali
   d. 8 tahun sekali

3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih ....
   a. anggota DPR
   b. anggota DPD
   c. anggota legislatif
   d. Presiden dan Wakil Presiden
4. Asas pemilu yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih dalam pemilihan umum adalah asas ....
   a. langsung
   b. umum
   c. bebas
   d. rahasia
5. Di Indonesia, pemilu pertama diselenggarakan pada tahun ....
   a. 1955
   b. 1971
   c. 1977
   d. 1982
6. Pemilu pertama dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan pada tahun ....
   a. 1992
   b. 1997
   c. 1999
   d. 2004
7. Yang menjadi penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati ialah ....
   a. KPU Pusat
   b. KPU Provinsi
   c. KPU Kabupaten/Kota
   d. DPRD Kabupaten/Kota
8. Jumlah anggota KPU Pusat adalah ....
   a. 3 orang
   b. 5 orang
   c. 7 orang
   d. 11 orang

9. Fungsi legislatif di Indonesia dijalankan oleh ….
   a. Presiden dan Wapres
   b. Mahkamah Agung
   c. Dewan Perwakilan Rakyat
   d. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Yang tidak termasuk ke dalam tugas dan fungsi MPR ialah ….
   a. menetapkan UUD
   b. melantik Presiden dan Wakil Presiden
   c. memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
   d. memeriksa keuangan negara
11. DPR memiliki hak membuat rancangan undang-undang. hak ini disebut hak ….
   a. petisi
   b. inisiatif
   c. angket
   d. budget
12. Dalam pemerintahan pusat, pmegang kekuasaan eksekutif ialah ….
   a. Presiden/Wakil Presiden
   b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
   c. Dewan Perwakilan Rakyat
   d. Mahkamah Agung
13. Di tingkat pemerintah desa, pemegang kekuasaan legislatif ialah ….
   a. BPD
   b. Kepala Desa
   c. Sekretaris Desa
   d. Perangkat Desa
14. Yang bukan tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan, yakni ….
   a. menetapkan Peraturan Pemerintah
   b. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
   c. membentuk dewan pertimbangan
   d. membuat perjanjian dengan negara lain

15. Hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaporakan kepada lembaga-lembaga berikut, *kecuali* ….
    a. DPD
    b. DPR
    c. DPRD
    d. Presiden

B. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni berasal dari kata …. yang artinya …. dan kata …. yang artinya ….
2. Guna memilih wakil-wakil rakyat dan menyusun pemerintahan negara, di Indonesia diadakan ….
3. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan setiap … tahun sekali.
4. Pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga pelaksana pemilu yang disebut ….
5. Anggota KPU terdiri atas …. orang dan diambil dari ….
6. Tugas dan wewenang MPR menurut pasal 3 UUD 1945 ialah ….
7. Lembaga negara yang mewakili daerah di tingkat pusat ialah ….
8. Lembaga negara dalam UUD 1945 yang memegang kekuasaan legislative ialah ….
9. Hak DPR untuk mengadakan penelitian atas kebijakan yang dilakukan presiden disebut hak ….
10. Yang memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintah (eksekutif) di tingkat Provinsi ialah ….
11. Fungsi pemerintahan ada tiga macam, yaitu fungsi ….., …., dan ….
12. Dalam tata pemerintahan Indonesia, Presiden memegang fungsi sebagai lembaga … .
13. Contoh fungsi Presiden sebagai lembaga legislasi ialah pada saat ….
14. Lembaga di Indonesia yang menjalankan fungsi yudikatif ialah ….
15. Yang berwenang memutuskan sengketa antarlembaga negara ialah ….

C. Essay

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! Kerjakan dalam kertas lain!

1. Apa tujuan diselenggarakannya pemilihan umum?
2. Jelaskan asas-asas pemilihan umum menurut UU Nomor 12 tahun 2003!
3. Kemukakan lembaga apa saja yang dibentuk dengan pemilihan umum?
4. Jelaskan tiga fungsi pemerintahan!
5. Kemukakan lembaga negara yang memegang fungsi legislatif!
6. Jelaskan tugas dan wewenang Komisi Yudisial!
7. Jelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi!
8. Kemukakan lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan negara oleh Presiden!
9. Siapa yang berhak memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden jika terbukti melakukan tindakan korupsi dan melanggar hukum yang berat?
10. Kemukakan tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!
11. Kemukakan 5 hak Dewan Perwakilan Rakyat!
12. Jelaskan tugas Mahkamah Agung!
13. Kemukakan pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif di Provinsi!
14. Kemukakan pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif di Kabupaten/Kota!
15. Kemukakan pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat desa!

Latihan Semester I

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Nilai juang yang menonjol saat mempersatukan perbedaan pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI yakni nilai ....
   a. ketuhanan
   b. rela berkorban
   c. kebersamaan
   d. keikhlasan
2. Nilai juang adalah sesuatu yang ....
   a. berharga dalam perjuangan
   b. berguna dalam perjuangan
   c. menghambat perjuangan
   d. menjadi alat perjuangan
3. Berikut ini yang tidak termasuk tahapan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yakni sidang ....
   a. BPUPKI I
   b. Panitia Sembilan
   c. PPKI
   d. Konstituante
4. Tokoh yang mengusulkan agar Dasar Negara Republik Indonesia diberi nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 ialah ....
   a. Drs. Moh. Hatta
   b. Mr. Muh. Yamin
   c. Mr. A. Subarjo
   d. Ir. Soekarno
5. Berikut nilai-nilai perjuangan yang tidak menjiwai para pejuang kemerdekaan pada saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yakni ....
   a. pamrih
   b. keikhlasan
   c. kegigihan
   d. kebersamaan

6. Contoh perwujudan nilai kebersamaan dalam kehidupan siswa misalnya ☐.
   a. menengok teman yang sakit
   b. menolong orang yang sedang berkelahi
   c. memberi makan fakir miskin
   d. membantu teman yang sedang ulangan
7. Untuk mempersatukan bangsa, nilai juang yang patut dimiliki bangsa kita saat ini ialah nilai ☐.
   a. kegigihan
   b. rela berkorban
   c. keikhlasan
   d. kebersamaan
8. Berikut termasuk sikap gigih, *kecuali* ☐.
   a. sabar dan ulet
   b. mudah bosan
   c. tak mudah bosan
   d. pantang menyerah
9. Berikut ini bukan nilai Pancasila, yakni ☐.
   a. Ketuhanan
   b. Kemanusiaan
   c. Kebangsaan
   d. Kebebasan mutlak
10. Bukti yang menunjukkan bahwa dalam proses perumusan dasar negara para pejuang bangsa kita menjunjung nilai kebersamaan ialah diubahnya sila Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya menjadi ☐.
    a. Ketuhanan yang berkeadilan
    b. Ketuhanan Yang Maha Esa
    c. Ketuhanan yang kebudayaan
    d. Ketuhanan yang berkemanusiaan
11. Ketika hendak pergi ke sekolah, Dewi menolong anak yang tertabrak sepeda motor. Akibatnya, ia terlambat masuk sekolah. Nilai perjuangan yang dilakukan Dewi adalah nilai ☐.
    a. keadilan
    b. rela berkorban
    c. keberanian
    d. kebersamaan

12. Dalam berdiskusi, Tatang tidak marah meskipun pendapatnya dikritik oleh Dadang , karena Tatang mengamalkan nilai juang, yakni nilai □.
    a. demokratis
    b. keadilan
    c. persatuan
    d. kemanusiaan
13. Untuk menyelesaikan krisis di Indonesia, nilai juang yang perlu dimiliki bangsa kita saat ini ialah nilai □.
    a. kebersamaan
    b. kemanusiaan
    c. keadilan
    d. keikhlasan
14. Berikut peribahasa yang menunjukkan nilai kebersamaan dalam kehidupan bangsa Indonesia, *kecuali* □.
    a. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
    b. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah
    c. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian
    d. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
15. Rumusan Pancasila yang sah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea □.
    a. pertama
    b. kedua
    c. ketiga
    d. keempat
16. Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia dalam pemerintahannya ialah sistem demokrasi □.
    a. ekonomi
    b. perwakilan
    c. politik
    d. langsung
17. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan setiap □.
    a. 4 tahun sekali
    b. 5 tahun sekali
    c. 6 tahun sekali
    d. 8 tahun sekali

18. Sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2003, Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih ....
    a. anggota DPR
    b. anggota DPD
    c. anggota legislatif
    d. Presiden dan Wakil Presiden
19. Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih dalam pemilihan umum. Ini adalah salah satu asas pemilihan umum, yakni asas ....
    a. langsung
    b. umum
    c. bebas
    d. rahasia
20. Di Indonesia, pemilu pertama diselenggarakan pada tahun ....
    a. 1955
    b. 1971
    c. 1977
    d. 1982
21. Pemilu pertama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan pada tahun ....
    a. 1992
    b. 1997
    c. 1999
    d. 2004
22. Penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati ialah ....
    a. KPU Pusat
    b. KPU Provinsi
    c. KPU Kabupaten/Kota
    d. DPRD Kabupaten/Kota
23. Jumlah anggota KPU Propinsi adalah sebanyak ....
    a. 3 orang
    b. 5 orang
    c. 7 orang
    d. 11 orang

24. Fungsi legislatif dalam pemerintahan Indonesia dijalankan oleh □.
    a. Presiden dan Wapres
    b. Mahkamah Agung
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Badan Pemeriksa Keuangan
25. Berikut ini bukan tugas dan fungsi MPR, yakni □.
    a. menetapkan UUD
    b. melantik Presiden dan Wakil Presiden
    c. memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
    d. memeriksa keuangan negara
26. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang disebut hak □.
    a. petisi
    b. inisiatif
    c. angket
    d. budget
27. Dalam pemerintahan pusat, pemegang kekuasaan eksekutif ialah □.
    a. Presiden/Wakil Presiden
    b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Mahkamah Agung
28. Di tingkat pemerintah desa, pemegang kekuasaan eksekutif ialah □.
    a. BPD
    b. Kepala Desa
    c. Sekretaris Desa
    d. Perangkat Desa
29. Yang termasuk tugas Presiden sebagai kepala negara, yakni □.
    a. menetapkan Peraturan Pemerintah
    b. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
    c. membentuk dewan pertimbangan
    d. membuat perjanjian dengan negara lain

30. Hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaporkan kepada lembaga-lembaga berikut, *kecuali* ….
    a. DPD
    b. DPR
    c. DPRD
    d. Presiden

B. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita dapat memetik nilai juang, yakni nilai ….
2. Bukti bahwa dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara para pejuang kita menggunakan nilai kebersamaan ialah ….
3. Nilai-nilai Pancasila yang mengatasi berbagai paham dan golongan ialah nilai ….
4. Nilai dalam Pancasila yang melandasi pejuang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara dalam sidang PPKI ialah nilai ….
5. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan menyusun pemerintahan negara, di Indonesia diadakan ….
6. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan setiap … tahun sekali.
7. Pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga pelaksana pemilu yang disebut ….
8. Anggota KPU terdiri atas …. orang dan diambil dari ….
9. Tugas dan wewenang MPR menurut pasal 3 UUD 1945 ialah ….
10. Lembaga negara yang mewakili daerah di tingkat pusat ialah ….

C. Essay

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! Tuliskan dalam kertas lain!

1. Kemukakan empat nilai juang dalam proses perumusan dasar negara Pancasila!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai kebersamaan!
3. Jelaskan nilai juang yang harus dimiliki para pelajar saat ini dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa!
4. Jelaskan sikat gigih! Apa manfaatnya untuk kehidupan?

5. Apa tujuan dilaksanakannya pemilihan umum?
6. Kemukakan pelaksana pemilu dari tingkat pusat sampai daerah!
7. Kemukakan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil perubahan!
8. Jelaskan makna fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
9. Apa yang dimaksud dengan amnesty dan abolisi?
10. Kemukakan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam tata pemerintahan Indonesia!
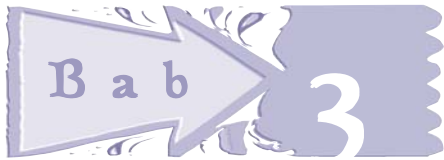
Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di Asia Tenggara

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Dalam hubungan dengan negara–negara lain di dunia, bangsa kita memiliki peran yang penting. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran yang besar. Selain sebagai negara pendiri ASEAN, banyak hal yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka kegiatan ASEAN.

Apa sajakah kegiatan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka kegiatan ASEAN? Apa manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan ASEAN bagi bangsa kita? Ikutilah uraian berikut dengan saksama.

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan arti dan pentingnya kerjasama internasional;
2. membedakan jenis kerjasama bilateral dan multilateral;
3. menjelaskan kerjasama Indonesia dengan ASEAN;
4 mengemukakan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara–negara di Asia Tenggara

Yang Dipelajari dalam Bab Ini (Peta Konsep)

Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara ASEAN

- Arti dan Pentingnya Kerjasama Internasional
- Jenis Kerjasama Internasional
  - Bilateral
  - Multilateral
- Kerjasama Indonesia dengan ASEAN
- Peran Indonesia dalam Kerjasama ASEAN
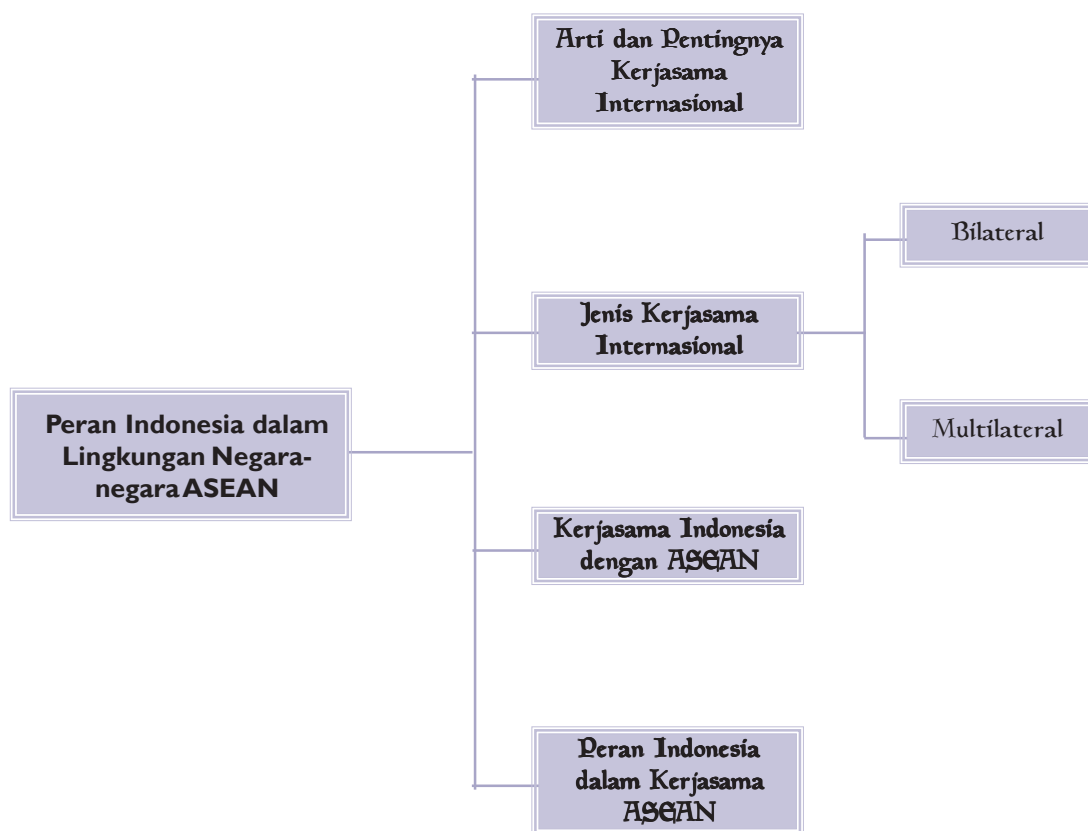
Kata-kata Kunci:

- ☐ peran
- ☐ kerjasama internasional
- ☐ Deklarasi Bangkok
- ☐ kerjasama bilateral
- ☐ kerjasama multilateral
- ☐ miteraka satata

A Kerjasama dan Perjanjian Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Ada beberapa alasan yang melandasi bangsa Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia, di antaranya alasan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan alasan politik.

Secara ekonomi, bangsa Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Secara sosial budaya, bangsa Indonesia adalah makhluk *zoon politicon*, makhluk yang suka berhubungan dengan orang lain. Secara keamanan, kita tidak aman jika tidak menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Secara politis, kita dapat terkucil dari pergaulan masyarakat dunia apabila tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa di dunia.

1. Pengertian dan Prinsip-prinsip Kerjasama Internasional

Apa yang dimaksud dengan kerja sama internasional? Bagaimana bentuk-bentuk kerja sama internasional?

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang sanggup hidup sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain.

Demikian juga dengan suatu bangsa atau negara. Bangsa Indonesia tidak mampu hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sumber: httpimages.google.co.idimageshl id&q EXXON

Gambar 3.1 Salah satu perusahaan patungan antara Indonesia dengan negara lain.

Mengapa suatu bangsa harus menjalin hubungan kerja sama dengan bangsa lain di dunia? Hal ini disebabkan karena tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Tuhan telah menjadikan manusia di muka bumi ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tiap suku dan bangsa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adanya kelebihan dan kekurangan ini dimaksudkan agar saling melengkapi satu sama lain.

Dalam kehidupan dunia internasional, kerja sama dengan bangsa lain sangat diperlukan. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Suatu bangsa yang tidak mau menjalin kerja sama dengan bangsa lain, bangsa itu akan tertinggal jauh dari bangsa lain. Ingat, dahulu Jepang pernah menutup diri dari dunia luar. Hanya dalam 100 tahun Jepang menutup diri dari negara lain, tetapi ketertinggalannya sangat jauh. Oleh sebab itu, kerjasama internasional merupakan keniscayaan (keharusan).

Apakah kerja sama internasional itu?

Dilihat dari asal-usul katanya kerja sama internasional berasal dari kata "kerja sama" dan "internasional". Kerja sama artinya bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil secara bersama-sama. Internasional berarti antarbangsa. Jadi, kerja sama internasional adalah kerjasama antarbangsa atau antarorganisasi internasional.

Sumber: www.mobillaku.com

Gambar 3.2 Kendaraan dari berbagai merek

Sumber: www.cnet.com.au

Gambar 3.3 Perusahaan Asing di Indonesia

Dalam menjalin kerja sama internasional, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi pihak-pihak yang mengadakan kerja sama, yakni:

a. Kerja sama internasional haruslah dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan satu sama lain;
b. Kerja sama internasional diabdikan kepada kepentingan nasional;
c. Dalam menjalin kerja sama internasional suatu negara tidak boleh mencampuri (mengintervensi) urusan dalam negeri negara lain.
d. Dalam kerja sama internasional harus dipatuhi ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku secara internasional.

Menurut pendapat kamu, apa pentingnya kerjasama internasional bagi rakyat Indonesia? Berikan alasanmu!

2. Jenis-jenis Kerja Sama dan Perjanjian Internasional

Meliputi apa saja perjanjian dan kerjasama internasional itu?

Ditilik dari pihak-pihak yang melakukannya, kerja sama internasional dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama seperti ini dinamakan kerja sama bilateral. Contoh: kerja sama Indonesia dengan Malaysia mengenai batas wilayah negara.

b. Kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Kerja sama seperti ini dinamakan kerja sama multilateral. Contoh, kerja sama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dalam organisasi ASEAN.

Jenis Kerjasama Internasional
- Kerjasama Bilateral
- Kerjasama Multilateral

Selain kerja sama bilateral dan multilateral, kita mengenal jenis-jenis kerja sama internasional dilihat dari bidang-bidang garapannya. Ada kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Kemukakan masing-masing 2 contoh kerjasama internasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan!

B Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

1. Hakikat Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Apa makna kerjasama negara-negara Asia Tenggara?

Kerjasama negara-negara Asia Tenggara adalah bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara adalah *Association of The South East Asian Nations* (ASEAN). Kerjasama negara-negara Asia Tenggara merupakan kerja sama dalam bidang ekonomi dan sosial. Kerja sama ini termasuk ke dalam bentuk kerja sama regional, karena lingkungannya terbatas pada regional Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di luar wilayah Asia Tenggara tidak dapat bergabung menjadi anggota ASEAN.

Gambar 3.4 Peta Asia Tenggara

Mengapa ASEAN tidak melakukan kerjasama dalam bidang militer?

2. Sejarah Lahirnya ASEAN

Bagaimana proses lahirnya organisasi ASEAN?

ASEAN merupakan organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari *Association of The South East Asian Nations*, artinya Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk oleh wakil lima negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu:

Sumber: sundaytimes.lkASEAN

Gambar 3.5 Penandatangan Deklarasi Bangkok

- Adam Malik (Indonesia),
- Tun Abdul Razak (Malaysia),
- Thanat Khoman (Thailand),
- Rajaratnam (Singapura), dan
- Narcisco Ramos (Filipina).

Kelima Menteri Luar Negeri dari kelima negara itu menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di ibukota Thailand, Bangkok. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, maka berdirilah ASEAN itu sebagai organisasi regional Asia Tenggara.

3. Tujuan ASEAN

Apakah tujuan didirikannya ASEAN bagi para anggotanya?

Tujuan didirikannya ASEAN tergambar dalam Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB;

c. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;

d. Saling memberi bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;

e. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana, pengangkutan dan komunikasi serta taraf hidup rakyatnya;

f. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.

Apakah tujuan tersebut telah sempurna? Jika belum coba sempurnakan!

Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama ASEAN didasarkan pada beberapa hal berikut:

a. saling menghormati;
b. mengakui hak setiap bangsa;
c. tidak ikut campur urusan dalam negeri negara masing-masing;
d. penyelesaian masalah secara damai;
e. tidak menggunakan ancaman atau kekuatan;
f. melaksanakan kerjasama secara efektif.;
g. miteraka setata.

4. Struktur ASEAN

Bagaimana struktur organisasi ASEAN itu?

Struktur organisasi ASEAN saat ini telah mengalami perubahan dari awalnya. Sebelum KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976, struktur organisasi ASEAN adalah seperti berikut:

- ☐ Sidang Tahunan Para Menteri
- ☐ Standing Committee
- ☐ Komite-komite Tetap dan Khusus
- ☐ Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN.

Sumber: www.rti.org

Gambar 3.6 Sekretariat ASEAN

Setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali tahun 1976, struktur organisasi ASEAN menjadi seperti berikut.

- ☐ Pertemuan para kepala pemerintahan (*Summit Meeting*). Pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN.
- ☐ Sidang Tahunan Menteri-menteri luar negeri ASEAN (*Annual Ministerial Meeting*).
- ☐ Sidang para menteri ekonomi.

- ☐ Sidang para menteri non ekonomi.
- ☐ Standing Committee.
- ☐ Komite-komite ASEAN.

5. Indonesia dan Perkembangan ASEAN

Bagaimana peran Indonesia dalam perkembangan ASEAN?

Ditinjau secara formal, ASEAN merupakan organisasi yang memfokuskan pada kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, tidak dapat diabaikan pula bahwa Deklarasi Bangkok sebagai salah satu dokumen keputusan berdirinya ASEAN didasari oleh aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi permasalahan di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, kawasan Asia Tenggara diwarnai oleh pergerakan-pergerakan dan pertentangan-pertentangan antara negara di kawasan itu dan kekuatan yang berada di luar kawasan. Aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional negara-negara anggota di segala bidang kehidupan.

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan Deklarasi Bangkok, para pemimpin dan pendiri ASEAN menyadari, bahwa di antara negara-negara anggota masih ada perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik. Begitu pula dengan kenyataan bahwa dalam bidang ekonomisebagian besar negara anggota bersaing sebagi penghasil komoditi yang sama.

Sejak kelahirannya, Pemerintah Indonesia memberikan prioritas utama dalam penggalangan kerja sama dengan negara-negara tetangga di sekitarnya. Sebab, di sinilah letak kepentingan Indonesia yang paling utama. Disamping itu, Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang menjadi kekuatan regional yang mandiri dan cukup kuat untuk bertahan dari pengaruh negatif atau gangguan dari luar.

Bagaimana kerjasama regional ASEAN ini dalam perkembangan selanjutnya?

Dalam perkembangan selanjutnya, kerja sama antara negara-negara ASEAN semakin bertambah mantap dan secara langsung berhasil meningkatkan semangat hidup setiap negara anggotanya. Bentuk-bentuk hubungan kerja sama dalam lingkungan negara-negara ASEAN terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Di bidang politik, ASEAN menyepakati untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. Pada KTT ASEAN di Bangkok tahun 1995, ASEAN juga menyepakati untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN berupaya menciptakan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Di bidang sosial budaya, kerja sama yang sudah dilakukan adalah pertukaran dan kunjungan misi kebudayaan masing-masing negara. Disamping itu, telah dilakukan pula program pertukaran pelajar dan mahasiswa, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran yang cukup penting. Selain sebagai pendiri organisasi ini, sekretariat ASEAN juga berada di Indonesia. Sehingga segala aktivitas atau kegiatan ASEAN digodok di Indonesia.

Sebagai anggota ASEAN yang aktif Indonesia memegang peran penting dalam mengusahakan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir dan memprakarsai pertemuan Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk mengatasi masalah krisis Vietnam.

Negara-negara anggota ASEAN sampai saat ini terdiri atas 10 negara, yakni:

a) Indonesia (8 Agustus 1967);
b) Malaysia (8 Agustus 1967);
c) Filipina (8 Agustus 1967);
d) Singapura (8 Agustus 1967);
e) Muang Thai (8 Agustus 1967);
f) Brunei Darussalam (7 Januari 1984);
g) Vietnam (28 Juli 1995);
h) Laos (23 Juli 1997);
i) Myanmar (23 Juli 1997)
j) Kamboja (16 Desember 1998)

Dari kerjasama ASEAN ini, mana yang manfaatnya dapat kamu rasakan sebagai pelajar?

Beberapa hal yang dilakukan ASEAN di lingkungan Asia Tenggara di antaranya:

a. Menyesaikan konflik antarnegara ASEAN sendiri seputar masalah perbatasan wilayah;
b. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, peningkatan promosi pariwisata, pengembangan sector pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan;
c. Mengadakan kesepakatan tentang pengembangan industri penunjang pertanian di kawasan Asia Tenggara, yaitu proyek pupuk urea di Indonesia dan Malaysia, proyek superpospat di Filipina, proyek mesin diesel di Singapura, dan proyek abyu soda di Thai Land;

d. Dibentuk jariangan kabel laut yang menghubungkan negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan komunikasi;
e. Diadakan festival menyanyi, program pertukaran artis radio dan televisi, pecan film, pameran lukisan dan foto, serta pertukaran wartawan antaranggota ASEAN;
f. Mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberian bewasiswa bagi para siswa dan mahasiswa ASEAN, pelatihan dan kursus;
g. Dalam bidang olah raga, ASEAN mengadakan SEA GAMES (*South East Asian Games*).

C Kerjasama SEAMEO

Apakah kerjasama SEAMEO itu? Dalam hal apa bidang gerak kerjasama ini?

Sebelum ASEAN dibentuk, kerja sama regional di Asia Tenggara sebetulnya sudah dirintis dengan disepakati adanya lembaga yang dinamakan South East Asian Ministers of Education Oragnization (SEAMEO). Organisasi ini merupakan organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kerja sama antarbangsa di wilayah regional Asia Tenggara.

Bidang keja sama SEAMEO adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Lembaga ini, pada tahun 1974 beranggotakan menteri pendidikan dari negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Republik Khmer (Kamboja), Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thai Land, dan Republik Vietnam (Vietnam Selatan). Selain itu, ada tiga negara, yaitu Perancis, Australia, dan Selandia Baru yang tercatat sebagai anggota peserta (Associate Member).

Sebagai lembaga yang menentukan garis-garis kebijaksanaan tertinggi adalah SEAMEC (South East Asian Ministers of Education Council), sedangkan pelaksananya ialah SEAMES (South East Asian Ministers of Education Secretariate) yang berkedudukan di Bangkok.

Setelah seluruh Vietnam dikuasai oleh Vietcong dan demikian pula Laos di bawah pengaruh Vietnam, maka ketiga negara tersebut tidak aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan SEAMEO.

Kegiatan lembaga ini terutama diselenggarakan melalui program yang berpusat pada Regional Centres, yaitu:

a) **BIOTROP**, *Regional Centre for Tropical Biology*, di Bogor Indonesia.
b) **RECSAM**, *Regional Centre for Education, Science and Mathematics* di Penang Malaysia.

c) **RELC**, *Regional English Language Centre*, di Singapura.

d) **SEARCA**, *Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture* di Los Banos, Filipina.

e) **INNOTECH**, *Regional Centre for Educational Innovation and Technology*, yang semula di Saigon (Vietnam) kemudian pindah ke Bangkok.

D Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di Asia Tenggara

Apa saja peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara?

Di lingkungan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran yang cukup penting. Di antara peran yang dimainkan bangsa Indonesia ialah:

1. Pelopor berdirinya ASEAN.

   Bersama-sama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Muang Thai, Indonesia mendirikan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

2. Perintis dan pendiri SEAMO.

   Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan, Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya mendirikan SEAMO.

3. Menggagas Jakarta Informal Meeting.

   Saat di Vietnam terjadi perang, Indonesia memelopori perdamaian dengan melakukan Jakarta Informal Meeting (Pertemuan Tidak Resmi Jakarta).

4. Turut serta dan menjadi tuan rumah dalam kegiatan SEA GAMES.
5. Menjadi tempat sekretariat ASEAN.
6. Turut serta menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan Asia Tenggara.
7. Menolak dijadikannya Asia Tenggara sebagai pangkalan militer Amerika.
8. Menjadi tuan rumah dalam kegiatan ASEAN dan SEAMEO.

Bagaimana pendapatmu terhadap peran Indonesia seperti tersebut di atas? Adakah peran lainnya? Sebutkan!

Rangkuman

1. Kerja sama internasional adalah kerja sama antar negara di dunia.
2. Kerja sama internasional dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kerja sama bilateral dan multilateral.
3. Kerja sama internasional dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.
4. Untuk mewujudkan kerja sama internasional, negara-negara menempatkan perwakilannya di negara lain, ada perwakilan diplomatik dan konsuler.
5. Kerjasama regional Asia Tenggara adalah kerja sama yang diadakan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
6. Kerjasama regional Asia Tenggara yang paling terkenal ialah ASEAN (*Association of The South East Asian Nations*).
7. Kerjasama ASEAN adalah kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.
8. Kerjasama ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967.
9. Peran Indonesia dalam kegiatan ASEAN sangat penting, selain sebagai pendiri juga sekretariat ASEAN terletak di Jakarta.
10. Kerja sama negara-negara Asia Tenggara selain ASEAN adalah SEAMEO (*South East Asian Ministers of Education Organization*), Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara.

Kegiatan Siswa

Kegiatan I

Diskusikan dengan teman-temanmu, apa saja yang dapat kamu jadikan sebagai bukti bahwa Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan bangsa luar. Tuliskan dalam kotak seperti berikut ini.

No.	Bidang Kehidupan	Bukti bahwa Indonesia bekerjasama dengan negara lain
1	Pendidikan	Contoh: Pertukaran pelajar dan mahasiswa
2	Sosial Budaya	
3	Ekonomi	
4	Politik	

Kegiatan 2

Diskusikan dengan teman sebangkumu, bentuk kerja sama apa saja yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara!

Bentuk Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara
....
....
....
....
....
....
....

Kegiatan 3

Kemukakan beberapa kerjasama yang telah dilakukan ASEAN dalam bidang-bidang berikut ini.

No.	Bidang Kehidupan	Bentuk Kegiatan yang Dilakukan ASEAN
1	Politik	
2	Ekonomi	
3	Sosial Budaya	
4	Olahraga	

Kegiatan 4

Diskusikan dengan teman-temanmu peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang-bidang berikut.

No.	Bidang Kehidupan	Peran Indonesia
1	Politik	
2	Ekonomi	
3	Sosial Budaya	
4	Olahraga	

Latihan Bab 3

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Bangsa Indonesia selalu menjalin kerja sama dengan bangsa lain karena bangsa Indonesia merupakan makhluk ....
   a. religius
   b. bermoral
   c. individu
   d. sosial

2. Kerjasama antarnegara di wilayah dunia tertentu disebut kerja sama ....
   a. bilateral
   b. internasional
   c. lokal
   d. regional

3. Ditinjau dari pihak-pihak yang mengadakan kerjasama, kerjasama ASEAN termasuk ke dalam bentuk kerjasama ....
   a. kelompok
   b. bilateral
   c. multilateral
   d. trilateral

4. Perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia mengenai batas wilayah tergolong ke dalam bentuk perjanjian ....
   a. bilateral
   b. multilateral
   a. politik
   b. pakta pertahanan

5. ASEAN didirikan pada tanggal ....
   a. 7 Agustus 1967
   b. 8 Agustus 1967
   c. 7 Agustus 1968
   d. 8 Agustus 1968

6. Yang tidak termasuk negara pendiri ASEAN ialah….
   a. Vietnam
   b. Indonesia
   c. Malaysia
   d. Filipina
7. Sekretariat tetap ASEAN ditetapkan di kota ….
   a. Kuala Lumpur, Malaysia
   b. Jakarta, Indonesia
   c. Bangkok, Thai Land
   d. Manila, Filipina
8. Bentuk kerja sama dalam bidang pendidikan antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN di antarnya ialah ….
   a. pertukaran pelajar
   b. pengiriman misi kesenian
   c. pendirian sekolah internasional
   d. pelatihan bersama guru
9. Selain kerja sama ASEAN, bangsa-bangsa Asia Tenggara juga bekerja sama dalam organisasi ….
   a. SEA GAMES
   b. MEE
   c. OKI
   d. SEAMEO
10. RECSAM dipusatkan di kota ….
    a. Bogor, Indonesia
    b. Penang, Malaysia
    c. Bangkok, Thai Land
    d. Manila, Filipina

B. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Kerjasama antara bangsa-bangsa di dunia dinamakan …..
2. Kerja sama yang dilakukan oleh dua negara disebut ….
3. Kerja sama yang dilakukan banyak negara disebut ….

4. Kerjasama ASEAN yang didirikan oleh lima menteri luar negeri yaitu kerjasama □.
5. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi □.
6. Negara-negara pendiri ASEAN ialah negara □.
7. Tujuan didirikannya ASEAN adalah menjalin kerjasama dalam bidang □.
8. Peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di antaranya □.
9. SEAMEO adalah kerja sama dalam bidang □.
10. BIOTROP berpusat di □.

C. Essay

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Jelaskan makna kerja sama internasional!
2. Kemukakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan kerja sama internasional!
3. Mengapa bangsa Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan bangsa lain di dunia?
4. Kemukakan 3 manfaat kerja sama Indonesia dengan ASEAN!
5. Kemukakan 5 bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa lain di dunia!
6. Tuliskan landasan hukum kerja sama Indonesia dengan bangsa lain!
7. Jelaskan perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler!
8. Kemukakan tujuan kerja sama ASEAN!
9. Kemukakan negara-negara ASEAN sekarang!
10. Jelaskan tujuan kerja sama SEAMEO!

Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan dengan bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai dicanangkan sejak awal merdeka.

Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerja sama dengan bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa kita tidak membatasi hubungan dengan negara-negara barat saja, juga tidak membatasi dengan bangsa-bangsa timur saja. Indonesia menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia.

Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berdasar pada landasan konstitusional, yakni tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan pasal 11 UUD 1945

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, pada masa orde lama (tahun 1959 - 1965) pernah terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif ini. Saat itu bangsa Indonesia cenderung mengeblok ke Rusia (timur). Pada waktu itu, politik luar negeri Indonesia berporos Jakarta - Pyongyang - Peking.

Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan juga membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya.

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan arti politik luar negeri bebas aktif;
2. mengemukakan landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif;
3. menjelaskan penyimpangan politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa orde lama;
4. mengemukakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif;
5. menjelaskan pentingnya politik luar negeri bebas aktif di era globalisasi.

Yang Dipelajari dalam Bab Ini (Peta Konsep)

Kata-kata Kunci:

- ☐ bebas
- ☐ aktif
- ☐ blok barat
- ☐ blok timur
- ☐ non blok (non aligned)
- ☐ cold war
- ☐ penyimpangan
- ☐ globalisasi
- ☐ dasa sila bandung

A Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menetapkan haluan politik luar negerinya, yakni politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik luar negeri bebas aktif ini menjadi landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain dan dengan organisasi internasional lainnya.

Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif?

1. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap politik luar negeri Indonesia seperti berikut.

" tetapi mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara *pro Rusia* atau *pro Amerika*? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan internasional, tetapi kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

Perjuangan kita harus dilaksanakan di atas semboyan kita yang lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita akan mengambil keuntungan dari pergolakan internasional."

Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta. Ia mengatakan, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
b. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri;
c. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.

Politik yang bebas aktif, bebas berarti bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara mana pun. Kita tidak membatasi hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa saja atau dengan bangsa Timur saja. Kita berhubungan dengan semua bangsa di dunia. Aktif, artinya bahwa bangsa Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Perwujudannya, bahwa bangsa Indonesia akan berusaha untuk membantu negara-negara yang terjajah agar terbebas dari penjajahan, tidak mau menjajah bangsa lain, dan selalu mengutamakan jalan pemecahan dengan cara damai terhadap setiap konflik yang terjadi.

Bagaimana pendapatmu terhadap pendirian bangsa Indonesia tersebut? Mengapa demikian?

2. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Bagaimana tujuan dan prinsip-prinsip yang digunakan bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya?

Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif ialah:

a. untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa;
b. ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat;
c. menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.

Bagaimana pendapatmu dengan tujuan politik luar negeri tersebut? Diskusikan dengan teman sebangkumu!

Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia menjalankan prinsip-prinsip berikut:

a. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia;
b. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
c. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional;
d. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.

Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

3. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memilki landasan yang kuat dan kokoh. Landasan tersebut tercantum pada alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 11 UUD 1945.

Dalam alinea pertama disebutkan, " □ penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Sedangkan dalam alinea keempat dinyatakan, " □ ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial □"

Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."

Selain landasan tersebut, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga berdasar pada Keterangan Pemerintah di depan sidang BP–KNIP tanggal 2 September 1948.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tetap diabdikan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara sosial bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang damai dengan semua negara di dunia. Sebab itu, kita tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara–negara tertentu saja. Kita terbuka terhadap semua bangsa dan negara dalam menjalin kerjasama.

Secara kejiwaan, apabila bangsa kita membatasi diri hanya dengan negara–negara tertentu saja, maka dapat menyebabkan bangsa kita terkucil oleh salah satu kelompok.

Karena alasan itu juga, bangsa Indonesia menentukan haluan politik luar negeri yang *bebas aktif*. Bebas artinya dalam menjalin hubungan internasional tidak dibatasi pada negara–negara tertentu saja. Aktif artinya, bangsa kita tak mau tinggal diam dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

4. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Orde Lama

Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama (1959 – 1965)?

Pada masa orde lama (Demokrasi Terpimpin), politik luar negeri Indonesia pernah belok ke arah negara–negara Eropa Timur atau Uni Sovyet, dan memusuhi negara–negara eropa. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu:

a. Faktor dari dalam negeri (intern), yaitu karena dominannya (besarnya pengaruh) Partai Komunis Indonesia (PKI) menguasai kehidupan politik Indonesia;

b. Faktor dari luar negeri (ekstern), yaitu kurang simpatiknya bangsa eropa dan Amerika dalam menghadapi berbagai persoalan di negara Indonesia.

Dengan dua alasan itu, pemerintah Indonesia akhirnya membelokkan haluan politiknya ke arah timur (Uni Sovyet). Indonesia mengambil haluan politik luar negeri dengan membentuk Poros Jakarta □ hanoi □ Phnom Penh □ Peking □ Pyongyang.

Dianutnya politik luar negeri yang cenderung condong ke Sovyet menyebabkan perubahan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang dengan leluasa.

Partai–partai politik lain dibubarkan satu per satu, sehingga dalam negara hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya terjadilah peristiwa G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965.

B Perwujudan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Bagaimana perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif?

Sebagai bangsa yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif itu. Di antara kegiatan yang dilakukan bangsa Indonesia dapat kamu baca seperti berikut ini.

1. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung

Mengapa diadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955?

Sebagai bangsa yang pernah merasakan betapa pahitnya hidup dalam penjajahan, bangsa Indonesia memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika bersama dengan negara India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka.

Persiapan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dilakukan di Colombo (Sri Lanka) pada tanggal 28 April – 2 Mei 1954 dan di Bogor (Indonesia) pada tanggal 29 Desember 1954.

Dalam persiapan itu disepakati bahwa Konferensi Asia Afrika (KAA) akan dilaksanakan di Bandung (Indonesia) pada tanggal 18 24 April 1955.

Sumber: www.asianafrican-museum.org

Gambar 4.1 Sidang/Pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung

Setelah disepakati, maka pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 di Kota Bandung (Jawa Barat) diseleng-garakan Konferensi Asia Afrika, tepatnya di Jalan Asia Afrika.

Apa maksud dan tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung?

Maksud dan tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah untuk:

a. meningkatkan kemauan baik (*goodwill*) dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama;
b. mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan negara-negara peserta;
c. mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang menyangkut rakyat Asia Afrika, dalam hal ini yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme;
d. meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan saham yang diberikan untuk peningkatan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Konferensi yang diselenggarakan di Bandung itu menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan nama Dasa Sila Bandung.

Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika seperti berikut ini.

No.	Negara	No.	Negara	No.	Negara
1	Afganistan	11	Kamboja	21	Saudi Arabia
2	Birma	12	Laos	22	Sri Lanka
3	Jepang	13	Lebanon	23	Sudan
4	Ethiopia	14	Liberia	24	Suriah
5	Filipina	15	Libia	25	Turki
6	Ghana	16	Mesir (RPA)	26	Vietnam Utara
7	India	17	Nepal	27	Vietnam Selatan
8	Indonesia	18	Pakistan	28	Yaman
9	Irak	19	Pantai Emas	29	Yordania
10	Iran	20	Republik Rakyat Cina		

2. Mendirikan Gerakan Non Blok

Bagaimana proses terbentuknya gerakan Non Blok (Non Aligned)? Apa tujuan dibentuknya gerakan ini?

Seusai Perang Dunia II, negara-negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yaitu **Blok Barat** yang dipimpin oleh **Amerika Serikat** dan **Blok Timur** yang dipimpin oleh **Uni Sovyet**.

Adanya dua kekuatan tersebut menyebabkan terjadinya "Perang Dingin" (*Cold War*) di antara kedua blok itu. Akibatnya, suhu politik dunia menjadi memanas dan penuh dengan ketegangan-ketegangan.

Guna mengatasi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang terus bersitegang, bangsa Indonesia memprakarsai didirikannya Gerakan Non-Blok (*Non Aligned*). Negara-negara pemrakarsa Non-Blok ialah:

a) Afghanistan
b) India
c) Indonesia
d) Republik Arab Persatuan (Mesir)
e) Yugoslavia.

Gerakan Non Blok ini dibentuk atas dasar Dasa Sila Bandung (hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung).

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Non Blok diadakan di Beograd/ Belgrado (Yugoslavia) dari tanggal 1 – 6 September 1961 atas undangan dari Presiden Yosef Broz Tito (Yugoslavia), Abdul Nasser (Mesir), dan Sukarno (Indonesia). KTT ini dihadiri oleh 25 negara dari Asia-Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.

Sumber: www.presidenri.go.id

Gambar 4.2 Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok

Konferensi ini dimaksudkan untuk meredakan ketegangan dunia dan menunjukkan kepada dunia bahwa masih ada pihak ketiga yang berada di luar kedua blok yang sedang bertentangan itu.

Setelah diadakan KTT Non Blok I, negara-negara yang tergabung dalam Non-Blok oleh negara-negara barat disebut sebagai Dunia Ketiga (The Third World).

Sampai saat ini, Non-Blok telah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) puluhan kali.

Temukan KTT kedua dan seterusnya, apa keputusan yang dihasilkan dalam setiap KTT. Tulis dalam buku tugasmu!

3. Mengirimkan Misi Garuda (MISIRIGA)

Apa yang dimaksud dengan misi garuda (misiriga)? Apa tujuannya?

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menyatakan, bahwa bangsa Indonesia akan senantiasa aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan misi ini, maka Indonesia mengirimkan misi perdamaian dunia dengan nama Pasukan Garuda. Pasukan ini diperbantukan untuk PBB dalam usaha turut mendamaikan daerah-daerah yang sedang bersengketa.

Sumber: www.tni.mil.id/images

Gambar 4.3 Misi Garuda Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB

Pada bulan Januari 1957 dikirimlah Pasukan Garuda I ke Timur Tengah di bawah komando Kolonel hartoyo, yang kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Suadi. Pada tahun 1960, di Kongo terjadi perang saudara. Untuk mendamaikan situasi di Kongo ini, Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda II di bawah pimpinan Kolonel Prijatna, sedangkan sebagai komandan batalion adalah Letkol Solichin Gautama Purwanegara.

Selanjutnya Misi Garuda III dikirim ke Kongo dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris.

Dalam setiap sengketa internasional yang menerjunkan PBB, Indonesia selalu siap sedia menjadi petugas misi perdamaian PBB melalui Pasukan Garuda. Keikutsertaan Indonesia dalam Misi Perdamaian ini tergabung dalam Pasukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Dalam pengiriman misi perdamaian ini, tentara dari Indonesia mendapat sambutan baik dari negara yang menerima. hal ini karena tentara kita mengembangkan sikap bersahabat dan cinta damai.

Sampai saat ini, bangsa Indonesia telah puluhan kali terlibat dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa–Bangsa (PBB).

Galilah dalam buku sejarah, sampai saat ini ke mana saja Indonesia mengirimkan Misi Garuda untuk mengawal perdamaian dunia? Tuliskan dalam buku tugasmu.

4. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Organization (UNO)

Mengapa Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota PBB? Apa maksud dan tujuannya?

Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, bangsa Indonesia ikut aktif menjadi anggota Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1950 dengan nomor anggota ke–60.

Pada masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin), Indonesia pernah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB, yakni pada tanggal 7 Januari 1965. Pada saat itu, politik luar negeri Indonesia sedang condong ke Sovyet. Akan tetapi, setelah zaman orde baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tetap pada urutan ke–60, karena oleh PBB Indonesia masih belum dicoret dari keanggotaan.

Sumber: www.eramuslim.com

Gambar 4.4 Utusan Indonesia sedang ikut dalam sidang PBB

Sebagai anggota PBB, bangsa Indonesia aktif terus dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia internasional, salah satu di antaranya ialah dengan aktifnya Indonesia dalam mengirimkan misi perdamaian yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia Garuda (MISIRIGA).

5. Mendirikan ASEAN

Mengapa bangsa Indonesia mendirikan ASEAN? Apa maksud dan tujuannya?

Sebagai perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia dengan negara–negara Asia Tenggara lainnya mendirikan organisasi yang diberi nama ASEAN (*Association of The South East Asian Nations*), Organisasi Negara–negara Asia Tenggara.

ASEAN ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk:

Sumber: hids.arkib.gov.my

Gambar 4.5 Sidang Pembentukan ASEAN di Bangkok

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB;
c. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
d. Saling memberi bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;
e. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana, pengangkutan dan komunikasi serta taraf hidup rakyatnya;
f. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.

Tujuan tersebut termaktub dalam **Deklarasi Bangkok** yang ditanda-tangani oleh lima menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara. Kelima menteri tersebut ialah:

- Adam Malik (Indonesia),
- Tun Abdul Razak (Malaysia),
- Thanat Khoman (Thailand),
- Rajaratnam (Singapura), dan
- Narcisco Ramos (Filipina).

Dalam usaha memelihara stabilitas dan keamanan Asia Tenggara, Indonesia memprakarsai untuk melakukan pendekatan agar Asia Tenggara menjadi daerah bebas nuklir.

Pada saat berkecamuk Perang Vietnam, Indonesia juga memprakarsai diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting (JIM) yang membahas mengenai upaya-upaya mendamaikan Vietnam.

Bagaimana pendapatmu tentang peran Indonesia dalam ASEAN?

6. Menjalin Kerja Sama dengan Negara-negara di Dunia

Mengapa bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa di dunia?

Politik luar negeri yang bebas dan aktif memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Itulah sebabnya, sehingga bangsa Indonesia juga menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di dunia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, tanpa membatasi diri dengan negara-negara blok barat saja atau blok timur saja.

Sumber: www.doteramuslim.com

Gambar 4.6 Wakil Indonesia dalam Sidang Organisasi Konferensi Islam

Sebagai perwujudannya, bangsa kita menjadi anggota oragnisasi internasional. Dalam organisasi internasional, Indonesia juga bekerja sama dalam OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries* Negara-negara pengekspor minyak), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation* Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik). Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota organisasi internasional lainnya.

Dalam organisasi apa sajakah bangsa Indonesia menjalin kerjasama?

C Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif di Era Globalisasi

Bagaimana hubungan antara politik luar negeri Indonesia dengan globalisasi?

Kita semua memaklumi, bahwa saat ini kehidupan dunia sedang mengalami proses yang dinamakan globalisasi. Globalisasi adalah proses kehidupan yang mulai mendunia. Keadaan ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi.

Sumber: www.mahkamah konstitusi.go.id

Gambar 4.7 Sedang Menonton Acara Sepak Bola Liga Itali di TV

Dengan globalisasi, dunia seakan-akan terasa mengecil. Hal ini terasa sekali ketika kita sedang menyaksikan suatu peristiwa di belahan dunia lain dalam waktu yang bersamaan. Seolah-olah dunia tidak mengenal batas-batas geografis. Demikian pula bila kita mengunjungi negara lain atau daerah lain dengan menggunakan alat transportasi moderen. Untuk menempuh suatu tempat hanya diperlukan waktu yang cukup singkat. Inilah salah satu tanda globalisasi.

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang terus melesat, ketergantungan antarnegara menjadi semakin tinggi, baik ketergantungan secara politis, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menghadapi kenyataan ini, tentu saja kita harus membuka diri terhadap seluruh bangsa-bangsa di dunia. Di abad globalisasi seperti sekarang ini, suatu bangsa tidak bisa lagi hanya menjalin hubungan dengan negara-negara tertentu saja. Kebutuhan negara akan barang-barang pemuas kebutuhan warga negara semakin beraneka ragam. Dan itu tidak semua dapat diproduksi oleh negaranya. Oleh sebab itu, maka menjalin hubungan dan kerja sama yang seluas-luasnya merupakan salah satu tantangan global.

Bagi bangsa Indonesia, politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan kunci dalam menjalin hubungan di abad global. Ini berarti, bagi bangsa Indonesia, globalisasi tidak harus mengubah haluan politiknya. Sebab, politik luar negeri Indonesia telah sesuai dengan tuntutan globalisasi. Politik luar negeri Indonesia memberi kesempatan dan peluang untuk melakukan hubungan dengan negara mana pun tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta agama.

Bagaimana pendapatmu tentang politik luar negeri bebas aktif dan globalisasi?

Rangkuman

1. Politik luar negeri Indonesia ialah bebas aktif. Bebas, artinya bahwa bangsa kita bebas menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia tanpa harus terikat dengan blok barat atau blok timur. Aktif, artinya bahwa kita akan senantiasa berusaha menciptakan dan mewujudkan kehidupan dunia yang aman dan damai.
2. Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tertuang dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 UUD 1945.
3. Sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950;
   b. menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955;
   c. mengirimkan misi perdamaian dunia yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia Garuda (MISIRIGA);
   d. membentuk gerakan non blok (non aligned) untuk meredakan ketegangan akibat perang dingin antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyet.
   e. Membentuk organisasi ASEAN untuk menciptakan stabilitas Asia Tenggara yang aman, tertib, dan damai pada tanggal 8 Agustus 1967.
   f. Menjalin kerja sama ekonomi, politik, sosial budaya, dan iptek dengan negara-negara di dunia.
   g. Aktif dalam organisasi internasional seperti OKI, APEC, OPEC, dan sebagainya.
4. Di abad globalisasi, ketergantungan antarnegara semakin tinggi, sehingga tidak mungkin suatu negara hanya menjalin hubungan dengan negara tertentu saja. Bagi bangsa Indonesia, tututan globalisasi tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, sebab sejak awal kemerdekaan Indonesia menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia, tanpa ada pembatasan blok atau kepentingan politik. Sehingga dapat dikatakan, bahwa politik luar negeri bebas aktif sesuai dengan situasi globalisasi seperti sekarang ini.
5. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif ditujukan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kegiatan Siswa

Kegiatan 1

Diskusikan dengan temanmu di dalam kelas, mengapa bangsa Indonesia memilih haluan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Faktor apa yang mendasari bangsa Indonesia memilih haluan politik luar negeri bebas aktif?

Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kertas tersendiri!

Kegiatan 2

Diskusikan dengan temanmu di kelas, masing-masing 1 bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Tuliskan jawaban kamu dalam lembar kerja seperti contoh berikut.

No.	Bidang Kehidupan	Bukti bahwa Indonesia menjalankan politik bebas aktif
1	Ekonomi	
2	Politik	
3	Sosial Budaya	
4	Pertahanan Keamanan	

Kegiatan 3

Untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, bangsa Indonesia mengirimkan misi garuda yang tergabung dalam pasukan Dewan Keamanan PBB. Mengapa pasukan dari Indonesia berhasil dan mudah diterima masyarakat negara penerima?

Kegiatan 4

Sebagai perwujudan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga menjadi anggota gerakan non blok (non aligned). Apa saja manfaat Gerakan Non Blok bagi bangsa Indonesia?

Kegiatan 5

ASEAN pernah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Carilah informasi tentang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, tuliskan dalam lembar kerja seperti di bawah ini.

No.	KTT	Tahun	Penyelenggara	Negara yang hadir
1	KTT ASEAN I	1976	Indonesia	5 Negara
2	....	....	....	....
3	....	....	....	....
4	....	....	....	....
5	....	....	....	....
dst	....	....	....	....

Kegiatan 6

Buat karangan dengan topik "Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi". Karangan dibuat sedikit-dikitnya 100 kata. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar!

Latihan Bab 4

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif dilaksanakan atas landasan pokok yang tercantum dalam ....
   a. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
   b. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
   c. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
   d. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat
2. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif diabdikan untuk ....
   a. cita-cita nasional
   b. kepentingan nasional
   c. wawasan nasional
   d. tujuan nasional

3. Untuk pertama kali politik luar negeri Indonesia bebas aktif ditegaskan oleh pemerintah dalam sidang ….
   a. MPR c. Konstituante
   b. BP-KNIP d. PPKI
4. Dalam bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia bangsa Indonesia akan senantiasa berusaha menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah sifat politik luar negeri kita, yakni ….
   a. aktif c. netral
   b. bebas d. non-blok
5. Salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia menggunakan politik luar negeri bebas aktif adalah dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan ….
   a. Piagam Bandung c. Bandung Charter
   b. Dasasila Bandung d. Konvensi Bandung
6. Berdirinya non-blok pada tahun 1961 diprakarasi oleh kepala pemerintahan negara Asia Afrika. Salah satunya adalah dari Indonesia yakni ….
   a. Ir. Soekarno c. B.J. habibie
   b. Soeharto d. Abdurahman Wahid
7. Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB terjadi pada tanggal ….
   a. 26 September 1950 c. 28 September 1950
   b. 27 September 1950 d. 30 September 1950
8. Dalam rangka menciptakan stabilitas Asia Tenggara yang aman dan damai, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya mendirikan ….
   a. OPEC c. ASEAN
   b. APEC d. SEAMEO
9. Indonesia aktif mengirimkan Pasukan Garuda dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pasukan Garuda I tahun 1957 dikirim ke Timur Tengah dipimpin oleh ….
   a. Solichin GP c. Kolonel Prijatna
   b. Kolonel hartoyo d. Kemal Idris
10. Di era globalisasi ketergantungan antarnegara semakin tinggi, sehingga suatu negara tidak bisa hanya menjalin hubungan kerjasama dengan negara tertentu saja. Sifat politik luar negeri Indonesia yang sesuai dengan ini ialah ….
   a. bebas d. SEAMEO
   b. aktif d. damai

B. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Indonesia mengambil haluan politik luar negeri yakni ….. dan ….
2. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berdasar pada landasan hukum yang tercantum dalam ….
3. Politik luar negeri bebas aktif mengandung arti ….
4. Pendiri gerakan non blok ialah negara-negara ….., ……., ……., ……., dan …..
5. Negara-negara pemrakarsa diadakannya Konferensi Asia Afrika ialah ….
6. Tujuan gerakan non Blok ialah ….
7. Hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 diberi nama ….
8. Untuk menjaga stabilitas wilayah Asia Tenggara dibentuklah organisasi regional dengan nama ….
9. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965 karena alasan …..
10. Misi Garuda Indonesia II dikirim ke …. dengan tugas ….

C. Essay

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan arti politik luar negeri bebas aktif!
2. Jelaskan landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif!
3. Apa buktinya bahwa bangsa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif?
4. Kemukakan 5 negara pendiri non blok!
5. Jelaskan tujuan didirikannya non-blok?
6. Kemukakan pengaruh Dasasila Bandung terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika!
7. Jelaskan hal yang mendasari didirikannya ASEAN!
8. Mengapa Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1955?
9. Kapan Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB?
10. Jelaskan hal yang melatarbelakangi diadakannya Konferensi Asia Afrika?

Latihan Semester 2

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu menjalin kerja sama dengan bangsa lain karena bangsa Indonesia merupakan makhluk □.
   a. sosial
   b. bermoral
   c. individu
   d. religius
2. Ditinjau dari lingkupnya, kerjasama ASEAN termasuk ke dalam bentuk kerjasama □ .
   a. regional
   b. internasional
   c. lokal
   d. bilateral
3. Ditinjau dari pihak–pihak yang mengadakan kerjasama, kerjasama ASEAN termasuk ke dalam bentuk kerjasama □.
   a. kelompok
   b. bilateral
   c. multilateral
   d. trilateral
4. Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura mengenai batas wilayah tergolong ke dalam bentuk perjanjian □.
   a. bilateral
   b. multilateral
   a. politik
   b. pakta pertahanan
5. Sebagai organisasi regional, ASEAN berdiri pada tanggal □.
   a. 7 Agustus 1967
   b. 8 Agustus 1967
   c. 7 Agustus 1968
   d. 8 Agustus 1968

6. Berikut negara pendiri ASEAN, *kecuali* □.
   a. Vietnam
   b. Indonesia
   c. Malaysia
   d. Filipina
7. Sekretariat tetap ASEAN terletak di kota □.
   a. Kuala Lumpur, Malaysia
   b. Manila, Filipina
   c. Bangkok, Thai Land
   d. Jakarta, Indonesia
8. Bentuk kerja sama dalam bidang pendidikan antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN di antarnya ialah □.
   a. pertukaran pelajar
   b. pengiriman misi kesenian
   c. pendirian sekolah internasional
   d. pelatihan bersama guru
9. Selain kerja sama ASEAN, bangsa-bangsa Asia Tenggara juga bekerja sama dalam organisasi □.
   a. SEAMEO
   b. MEE
   c. OKI
   d. SEA GAMES
10. Pusat kegiatan RECSAM adalah di kota □.
    a. Bogor, Indonesia
    b. Penang, Malaysia
    c. Bangkok, Thai Land
    d. Manila, Filipina
11. Landasan pokok pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tercantum dalam □.
    a. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
    b. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
    c. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
    d. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat

12. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif diabdikan untuk ....
    a. cita-cita nasional
    b. tujuan nasional
    c. wawasan nasional
    d. kepentingan nasional
13. Untuk pertama kali politik luar negeri Indonesia bebas aktif ditegaskan oleh pemerintah dalam sidang ....
    a. MPR
    b. PPKI
    c. Konstituante
    d. BP-KNIP
14. Dalam bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia bangsa Indonesia akan senantiasa berusaha menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah sifat politik luar negeri kita, yakni ....
    a. bebas
    b. aktif
    c. netral
    d. non-blok
15. Salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia menggunakan politik luar negeri bebas aktif adalah dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan ....
    a. Piagam Bandung
    b. Dasasila Bandung
    c. Bandung Charter
    d. Konvensi Bandung
16. Berdirinya non-blok pada tahun 1961 diprakarasi oleh kepala pemerintahan negara Asia Afrika. Salah satunya adalah dari Indonesia yakni ....
    a. Wachid Hasyim
    b. Soeharto
    c. B.J. Habibie
    d. Ir. Soekarno
17. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal ....
    a. 26 September 1950
    b. 27 September 1950
    c. 28 September 1950
    d. 30 September 1950

18. Dalam rangka menciptakan stabilitas Asia Tenggara yang aman dan damai, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya mendirikan ….
    a. OPEC
    b. APEC
    c. ASEAN
    d. SEAMEO
19. Indonesia aktif mengirimkan Pasukan Garuda dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pasukan Garuda I tahun 1957 dikirim ke Timur Tengah dipimpin oleh ….
    a. Solichin GP
    b. Kolonel Hartoyo
    c. Kolonel Prijatna
    d. Kemal Idris
20. Ketergantungan antarnegara di era globalisasi semakin tinggi, sehingga suatu negara tidak dapat hanya menjalin hubungan kerjasama dengan negara tertentu saja. Sifat politik luar negeri Indonesia yang sesuai dengan ini ialah ….
    a. bebas
    b. aktif
    c. adil
    d. damai

B. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara disebut kerjasama ….
2. Ditinjau dari lingkupnya, kerjasama ASEAN termasuk ke dalam jenis kerjasama ….
3. ASEAN didirikan untuk ….
4. Peran Indonesia saat terjadinya krisis Vietnam ialah ….
5. Organisasi negara-negara di Asia Tenggara selain ASEAN ialah ….
6. Politik luar negeri Indonesia ialah …. dan …..
7. Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ialah ….
8. Bukti bahwa bangsa Indonesia tidak mengeblok ke timur dan barat ialah ….
9. Konferensi Asia Afrika di Bandung menghasilkan sebuah piagam yang bernama ….
10. Peran serta Indonesia dalam menjaga keamanan dunia diwujudkan dengan cara mengirimkan ….

C. Essay

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Jelaskan perbedaan kerjasama bilateral dengan multilateral!
2. Kemukakan tujuan didirikannya ASEAN!
3. Jelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN!
4. Kemukakan 3 kegiatan yang pernah dilakukan oleh ASEAN!
5. Pendiri ASEAN terdiri atas ….
6. Jelaskan arti politik luar negeri bebas dan aktif!
7. Mengapa bangsa Indonesia selalu berusaha menciptakan perdamaian abadi?
8. Jelaskan tujuan dibentuknya gerakan non blok!
9. Kemukakan 5 negara pendiri non blok!
10. Kemukakan 3 bentuk perwujudan politik luar negeri Indonesia bebas aktif!

Glosarium

Abolisi, pembatalan atau penghentian penuntutan perkara oleh Presiden.

Aktif, artinya bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Amnesti, yaitu pengampunan atau pembebasan hukuman politik oleh Presiden.

Bebas, artinya bangsa Indonesia selalu menjalin hubungan dan bekerjasama dengan semua bangsa di dunia, tanpa dibatasi oleh kepentingan politik atau blok tertentu.

Blok Barat, yaitu blok kekuatan dalam Perang Dunia II yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Blok Timur, yaitu blok kekuatan dalam Perang Dunia II yang dipimpin oleh Uni Sovyet.

Chauvinisme, paham kebangsaan sempit yang menganggap bangsanya paling hebat sehingga merendahkan bangsa lain.

Cold war, perang dingin (perang pengaruh dan kekuatan antara blok barat dan blok timur) setelah Perang Dunia II.

Dasasila Bandung, sepuluh dasar yang menjadi bahan pijakan bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menciptakan kehidupan yang merdeka, berdaulat dan berkeadilan. Dasa Sila Bandung merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Dasar negara, ideologi atau gagasan yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara.

Deklarasi Bangkok, deklarasi pendirian ASEAN (dilaksanakan di kota Bangkok, Muangthai)

Demos, yaitu rakyat.

Dokoritsu Zunbi Cosakai, nama Jepang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dokoritsu Zunbi Iinkai, nama Jepang untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Ekstern, dari luar.

Gigih, tidak kenal menyerah atau berhenti dalam berjuang (mengerahkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan atau cita-cita).

Globalisasi, proses menuju pada kehidupan yang mendunia, dintandai dengan semakin mudahnya kita menembus wilayah dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Goodwill, kemauan baik.

Grasi, hak presiden untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwayang telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung.

hak amandemen, yaitu hak DPR untuk menilai atau mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang;

hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan presiden/pemerintah;

hak budget, yaitu hak DPR untuk mengajukan anggaran (RAPBN);

hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan udang-undang kepada presiden/ pemerintah;

hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden;

hak Petisi, yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil pemerintah/Presiden.

hak pilih aktif, yaitu hak memberi suara dalam pemilihan umum.

hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih atau dicalonkan dalam pemilihan umum.

Intern, dari dalam.

Intervensi, campur tangan dalam urusan orang lain (negara lain).

Kebersamaan, merasa diri sebagai bagian dari semua, merasa satu ikatan, satu rasa, satu kepentingan.

Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan oleh dua negara.

Kerjasama internasional, adalah kerjasama yang dilakukan antarbangsa. Kerjasama yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara.

Kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara.

Kolonialisme, pendudukan yang mengarah ke imperialisme (penjajahan).

Kosmopolitisme, paham yang menganggap bahwa hanya ada satu bangsa di dunia.

Kratein, artinya pemerintahan.

Kratos, artinya memerintah.

Lapang dada, hati yang terbuka (menerima masukan, kritik, pendapat dari orang lain dengan hati yang ikhlas).

Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang.

Lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang (peraturan).

Lembaga Negara, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara.

Lembaga yudikatif, yaitu lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang (Penegakan hukum);

Miteraka setata, prinsip kesederajatan dalam hubungan internasional.

Miteraka setata, prinsip hidup bertetangga baik.

Nationale Staat, paham negara kesatuan.

Nilai juang, yaitu sesuatu yang bernilai dan berguna dalam mencapai sesuatu.

Non Aligned, artinya sama dengan non blok.

Non Blok, yaitu negara-negara yang tidak terikat dengan kekuatan blok barat dan blok timur.

Pancasila, lima dasar yang menjadi ideologi bangsa Indonesia.

Pantang menyerah, tidak mau menyerah sebelum cita-cita tercapai.

Pemerintah daerah, yaitu lembaga yang mengurusi negara di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Pemerintahan pusat, yaitu lembaga yang mengurusi negara di tingkat pusat (nasional);

Pemilihan umum, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Penyimpangan, keluar dari ketentuan atau kesepakatan yang dibuat.

Peran, adalah yang ditampilkan oleh seseorang atau lembaga.

Perwakilan diplomatik, perwakilan suatu negara di negara lain yang mengurusi masalah politik.

Perwakilan konsuler, perwakilan suatu negara di negara lain yang mengurusi masalah selain politik.

Rasialisme, paham yang membedakan derajat manusia karena perbedaan warna kulit.

Rehabilitasi, perbaikan nama baik dan pemberian ganti rugi terhadap seorang terdakwa yang salah dijatuhi hukuman.

Rela berkorban, rela hati untuk mengorbankan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain (orang banyak).

Representasi, mewakili kehadiran negaranya di negara lain.

Simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Tulus Ikhlas, rela hati dalam menerima, melakukan, dan meninggalkan sesuatu.

Third world, dunia ketiga (masyarakat di luar blok barat dan timur).

Indeks

Daftar Pustaka

Anonim, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Eka Jaya.

Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006, *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005, *himpunan Ketetapan MPRS dan MPR RI Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 2 dan Pasal 4*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2006, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Sujiyanto dan Muhlisin, 2007, *Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*, Jakarta: Ganeca Exact.

Sukadi, 2007, *Pegangan Guru PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) untuk Sekolah Dasar-Madrasah Ibtidaiah Kelas 6*, Bandung: Acarya Media Utama.

W.J.S. Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Aku Warga Negara Indonesia

Sebagai Warga Negara, kita dituntut memahami tugas dan hak-hak yang harus kita lakukan. Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang mengutamakan kewajiban daripada hak-haknya. Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keunggulan buku ini adalah:

1. Memuat materi sesuai dengan tuntutan kurikulum.
2. Penyajian interaktif dengan pendekatan berpikir kritis.
3. Memuat tugas dan kegiatan refleksi yang menggerakkan keterampilan sosial.
4. Bahasa penyajian sederhana diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak siswa berpikir kritis.

ISBN : 978-979-068-097-5

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Buku Teks yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam proses pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 6.728,-